

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2017-2022



KEPULAUAN SERIBU



PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2022 telah dapat diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan secara rutin setiap lima tahun setelah penetapan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017-2022.

Penyusunan Perubahan Renstra ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2022 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Wilayah Kepulauan Seribu.

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2022 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam melakukan tugasnya.

Jakarta, September 2020

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

JUNAEDI, S.Sos, M.Si
NIP. 196612051987031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I-2
DAFTAR ISI	I-3
DAFTAR GAMBAR	I-5
DAFTAR TABEL	I-6
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-7
1.2 Landasan Hukum.....	I-10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-13
1.5 Keterkaitan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan RPJMD.....	I-15
 BAB II GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kabupaten Adm. Kep. Seribu.....	II-1
2.1.1 Tugas.....	II-1
2.1.2 Fungsi.....	II-1
2.1.3 Struktur Organisasi.....	II-3
2.2 Sumber Daya Kabupaten Adm. Kep. Seribu.....	II-6
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	II-7
2.2.1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	II-7
2.2.1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	II-9
2.2.1.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-10
2.2.1.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	II-12
2.2.1.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	II-14
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	II-14
2.3 Kinerja Pelayanan Kab. Adm. Kep. Seribu Periode 2013-2017.....	II-15
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja.....	II-16
2.3.2 Realisasi Anggaran.....	II-18
2.4 Tantangan dan Peluang.....	II-27
2.4.1 Tantangan.....	II-28
2.4.1.1 Bencana Alam.....	II-28
2.4.1.2 Kerusakan Lingkungan.....	II-29
2.4.1.3 Keterbatasan Air Bersih dan Listrik.....	II-29
2.4.1.4 Kondisi Transportasi dan Dermaga.....	II-32
2.4.1.5 Kondisi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.....	II-33
2.4.1.6 Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi.....	II-33
2.4.1.7 Kondisi Ketahanan Pangan.....	II-34
2.4.2 Peluang.....	II-34
2.4.2.1 Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kab. Adm. Kep. Seribu.....	II-34
2.4.2.2 Potensi Perekonomian.....	II-35
2.4.2.3 Partisipasi Masyarakat.....	II-37
2.4.2.4 Potensi Pariwisata.....	II-38



BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	III-1
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	III-7
3.3	Telaah Arah Kebijakan Kewilayahan Kepulauan Seribu Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.....	III-15
3.4	Telaah Konsep Pengembangan Wisata.....	III-25
BAB IV	TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	V-1
5.1.1	Strategi.....	V-2
5.1.2	Arah Kebijakan.....	V-3
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	VI-1
BAB VII	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1	Indikator Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra.....	I-8
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-15
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kab. Adm. Kep. Seribu.....	II-6
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Konstan.....	II-34
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Seribu Tanpa Migas	II-35
Gambar 3.1	Pulau Pramuka.....	III-16
Gambar 3.2	Rencana Pengembangan Pulau Pramuka.....	III-17
Gambar 3.3	Pulau Panggang.....	III-18
Gambar 3.4	Pulau Tidung Besar.....	III-19
Gambar 3.5	Rencana Pembangunan floating deck sisi barat.....	III-21
Gambar 3.6	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.....	III-22
Gambar 3.7	Ragam Penyelenggaraan Event Festival.....	III-24
Gambar 3.8	Peta Pariwisata Sejarah dan Heritage.....	III-25
Gambar 3.9	Ilustrasi OFC.....	III-27
Gambar 3.10	Lokasi Pulau Panjang.....	III-28
Gambar 3.11	Potensi Pulau Panjang Sebagai <i>Hub</i> Transportasi.....	III-28
Gambar 3.12	Potensi Pengembangan Bandara dan TOD.....	III-29
Gambar 3.13	Kondisi Eksisting Aktivitas Dermaga Transportasi Air.....	III-30
Gambar 3.14	Kondisi Eksisting Dermaga Transportasi Air.....	III-30
Gambar 3.15	Contoh Resort Terapung.....	III-31
Gambar 3.16	Pulau Tidung Kecil dan Jembatan Cinta.....	III-32
Gambar 3.17	Pulau-Pulau Favorit di Kepulauan Seribu.....	III-32

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	II-7
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Kecamatan dan Kelurahan.....	II-8
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	II-9
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan dan Kelurahan.....	II-10
Tabel	2.5	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	II-10
Tabel	2.6	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan dan Kelurahan.....	II-12
Tabel	2.7	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	II-13
Tabel	2.8	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kecamatan dan Kelurahan.....	II-13
Tabel	2.9	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	II-14
Tabel	2.10	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2017.....	II-15
Tabel	2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan 2013-2017.....	II-17
Tabel	2.12	Realisasi Anggaran Kab. Adm. Kep. Seribu 2013-2017.....	II-18
Tabel	2.13	Kondisi Instalasi Pengolahan IPA-RO.....	II-29
Tabel	2.14	Jumlah Kapasitas Kondisi Produksi dan Kebutuhan Daya Listrik Pembangunan Instalasi IPA-SWRO.....	II-30
Tabel	2.15	Sektor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017.....	II-37
Tabel	2.16	Kunjungan Wisatawan Kepulauan Seribu 2012-2016.....	II-42
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	III-2
Tabel	3.2	Identifikasi Permasalahan Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	III-4
Tabel	3.3	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.....	III-13
Tabel	3.4	Isu Strategis.....	III-18
Tabel	4.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah.....	IV-2
Tabel	5.1	Analisis Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal....	V-2
Tabel	5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-4
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.....	VI-2
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.....	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi tuntutan pembangunan pada waktu pelaksanaan rencana lima tahun kedepan.

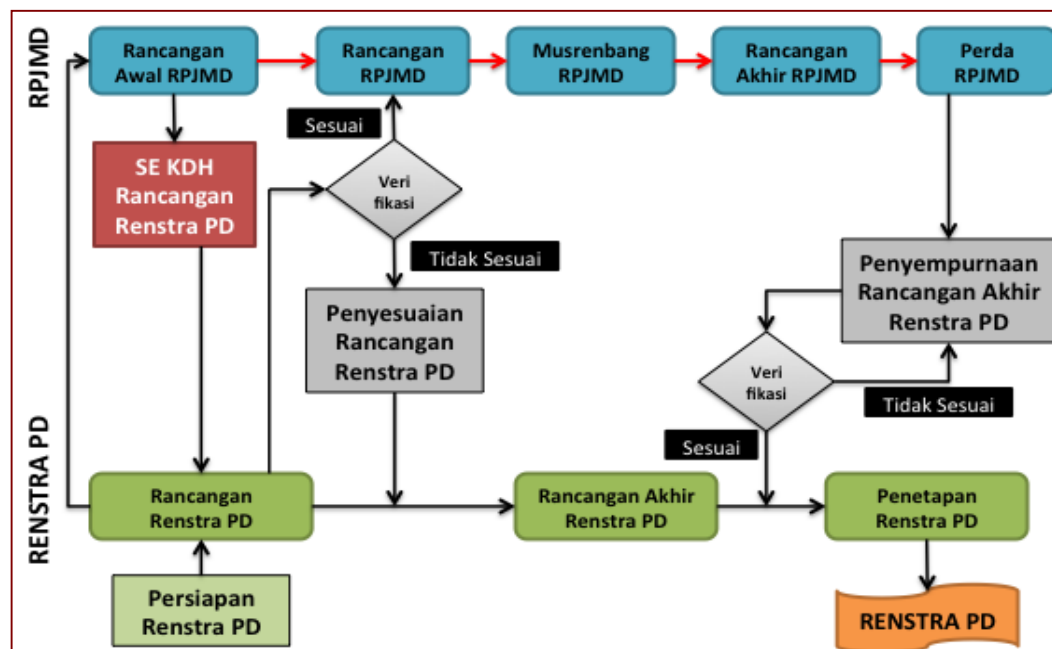
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Lebih lanjut, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah.

Dalam konteks ini, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sampai dengan penetapan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2017-2022

Dalam sisa masa periode pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2022, pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang utama adalah kondisi perekonomian global yang melambat akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Disamping itu, tantangan internal yang ada dalam pembangunan daerah antara lain adalah mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang kondusif, serta ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam rangka mempersiapkan bonus demografi. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang kondusif dan terkendali.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat DKI Jakarta, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif, dan berkesinambungan. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan peran dan fungsinya. Dengan demikian, perencanaan yang dihasilkan dapat berguna sebagai arah bagi pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu masyarakat DKI Jakarta yang adil, makmur dan sejahtera.

Seiring dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2022 tentunya akan mengalami perubahan dan penyesuaian sehingga dilakukan Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2022 sejalan dengan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung Visi dan

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Perubahan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2022 meliputi:

1. Penyesuaian Fungsi
2. Penyempurnaan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3. Penyempurnaan Indikator, Target Kinerja beserta Definisi Operasionalnya
4. Penyesuaian Nomenklatur Kegiatan Renstra
5. Penyesuaian pengampu Kegiatan Renstra

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2017-2022 maka seluruh entitas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dituntut mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan urusan pemerintahan umum (mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur) dengan memperhatikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap PD, sehingga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2022, digunakan sejumlah rujukan peraturan perundangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus IbuKabupaten Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

- 14) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
- 15) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 16) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Gubernur Kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- 17) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 18) Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2017-2022;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan tugas dan fungsi;

3. Menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum dan Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2.2 Sumberdaya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan dan Realisasi Kinerja Anggaran)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; telaahan visi, misi dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur; telaah arah kebijakan kewilayahan; telaah konsep pengembangan pariwisata serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2017-2022.

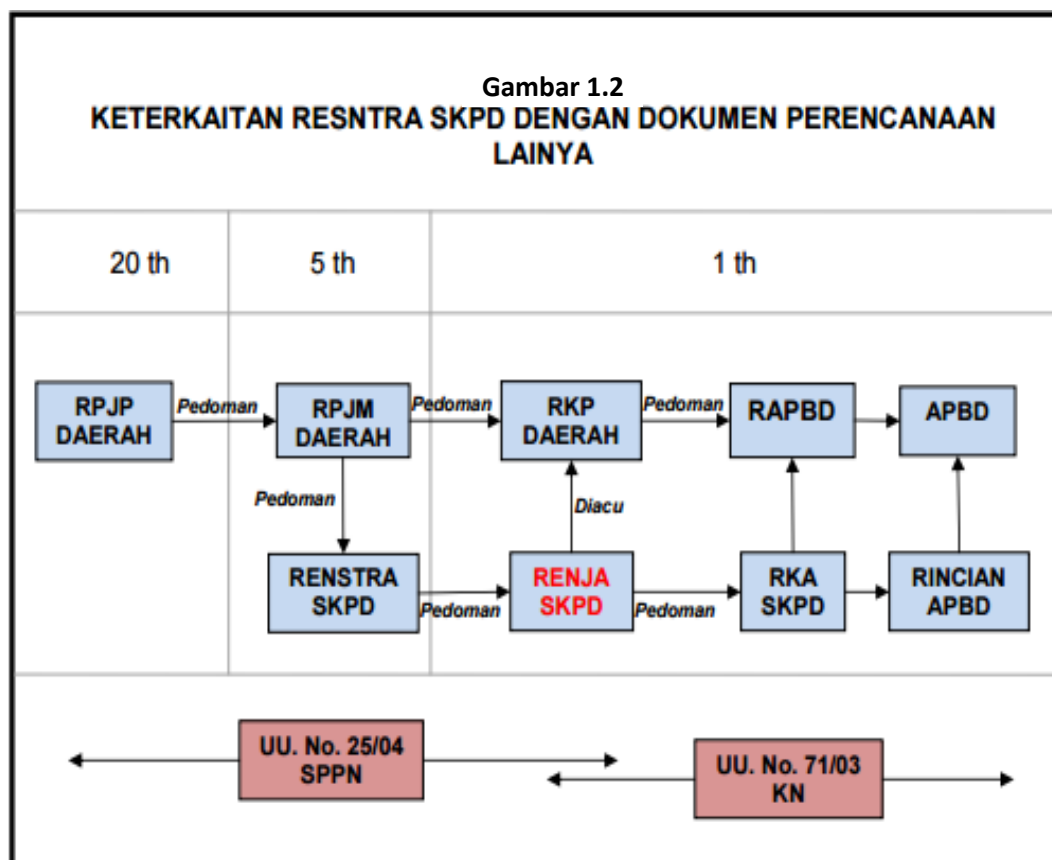
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu pada RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan dokumen – dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kabupaten



Administrasi Kepulauan Seribu akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran tahunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam dokumen Renja dan RKA.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam kedudukannya sebagai unsur pembantu Gubernur, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kabupaten Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Administrasi;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;

- d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat wilayahnya;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi;
- j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Administrasi;
- m. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten;
- o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kabupaten Administrasi;
- p. fasilitasi pengelolaan KORPRI Kabupaten Administrasi;
- q. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di wilayah, meliputi :

- a. Urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- c. Urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- d. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- f. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang jalan; dan
- g. Fungsi penyelenggaraan pencahayaan.

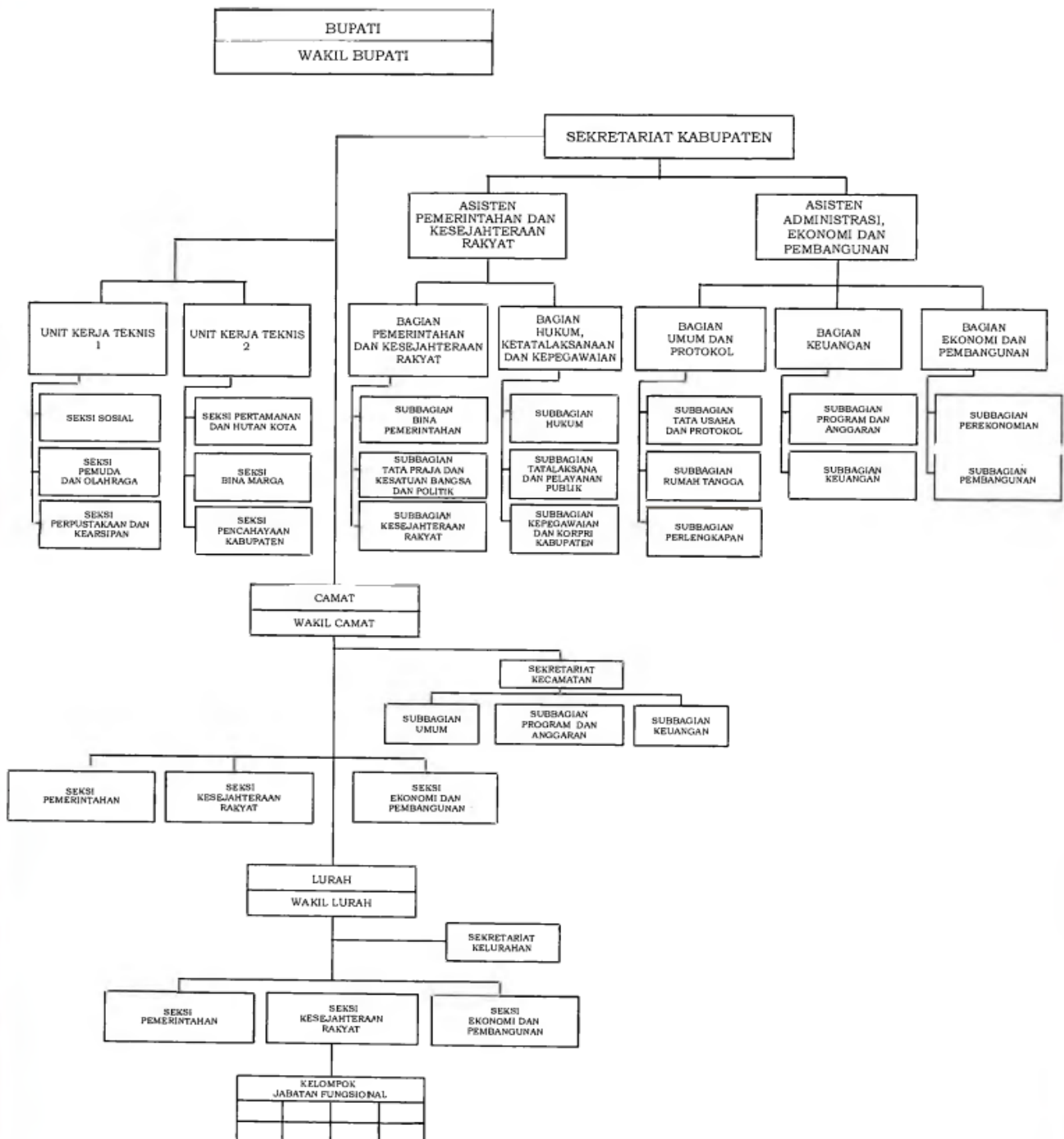
2.1.3 Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati
- c. Sekretariat Kabupaten, terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Bina Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 3) Subbagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian terdiri dari:
 - 1) Subbagian Hukum;
 - 2) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan Korpri Kabupaten.
 2. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3.) Subbagian Perlengkapan.

- b) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
- c) Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perekonomian; dan
 - 2) Subbagian Pembangunan.
- d. Unit Kerja Teknis 1, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sosial;
 - 2. Seksi Pemuda dan Olahraga; dan
 - 3. Seksi Perpustakaan dan Kearsipan.
- e. Unit Kerja Teknis 2, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertamanan dan Hutan Kota;
 - 2. Seksi Bina Marga; dan
 - 3. Seksi Pencahayaan Kabupaten.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Camat;
 - 2) Wakil Camat;
 - 3) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 - 4) Seksi Pemerintahan;
 - 5) Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 6) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - 7) Kelurahan, terdiri dari :
 - a) Lurah;
 - b) Wakil Lurah;
 - c) Sekretariat Kelurahan;
 - d) Seksi Pemerintahan,;
 - e) Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2.2 Sumberdaya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan jajarannya sebanyak 82 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 24 orang. Sedangkan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 15 orang, kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 13 orang, kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 15 orang, kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 13 orang. Adapun kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok umur 20-25 tahun dan 26-30 tahun masing-masing 1 (satu) orang.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Kab. Kep. Seribu Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Bupati							1	1
2	Wakil Bupati							1	1
3	Sekretariat Kabupaten						1		1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						1		1
5	Bagian Tata Pemerintahan		1	1	2		1	5	10
6	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	1		2	1	1	2	2	9
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat			2			4	5	11
8	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan					1			1
9	Bagian umum dan Protokol			5	9	10	3	2	29
10	Bagian Keuangan				2	1	1	3	7
11	Bagian Perekonomian dan Pembangunan			3	1		2	5	11
TOTAL		1	1	13	15	13	15	24	82

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Adapun jumlah total pegawai di dua kecamatan sebanyak 36 orang (Tabel 2.2), dimana pegawai paling banyak berumur lebih dari 50 tahun yakni 15 orang, pegawai umur 46-50 tahun sebanyak 7 (tujuh) orang, umur 41-45 tahun sebanyak 7 (tujuh) orang, umur 36-40 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, umur 31-35 tahun sebanyak 2 (dua) orang, dan umur 26-30 tahun sebanyak 2 (dua) orang.

Sedangkan jumlah total pegawai di seluruh kelurahan yang ada di Kab. Adm. Kep. Seribu sebanyak 29 orang (Tabel 2.2). Pegawai paling banyak berumur lebih dari 50 tahun yakni 29 orang, pegawai umur 46-50 tahun sebanyak 11 orang, umur 41-45 tahun sebanyak 7 (tujuh) orang, umur 36-40 tahun sebanyak 14 orang, umur 31-35 tahun sebanyak 12 orang dan umur 26-30 tahun sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur
Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kecamatan	0	2	2	3	7	7	15	36
2	Kelurahan	0	1	12	14	7	11	29	74
	Total	0	3	14	17	14	18	44	110

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, dapat diketahui bahwa secara umum pegawai di Sekretariat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan berada dalam kategori usia produktif untuk memberikan pelayanan kepada warga di Wilayah Kab. Adm. Kep. Seribu. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai yang berpotensi memasuki masa pensiun (berumur >50 tahun) sehingga perlu disiapkan pegawai yang akan menggantikannya.

2.2.1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui pegawai Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu terbanyak menempati golongan III sebanyak 43 orang, dan golongan II sebanyak 26 orang, kemudian golongan IV sebanyak 11 orang serta pegawai yang menempati golongan I sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Bupati				1	1
2	Wakil Bupati				1	1
3	Sekretariat Kabupaten				1	1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				1	1
5	Bagian Tata Pemerintahan		2	8		10
6	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian		1	8		9
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat		2	7	2	11
8	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan				1	1
9	Bagian umum dan Protokol	2	16	10	1	29
10	Bagian Keuangan		1	6		7
11	Bagian Perekonomian dan Pembangunan		4	4	3	11
TOTAL		2	26	43	11	82

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sedangkan pegawai di seluruh Kecamatan paling banyak menempati golongan III sejumlah 22 orang, untuk golongan IV sebanyak 2 orang dan golongan II sebanyak 12 orang, sementara itu tidak ada pegawai yang menempati golongan I (Tabel 2.4).

Adapun pegawai di seluruh kelurahan paling banyak menempati golongan III sejumlah 557 orang (70%), kemudian golongan IV sejumlah 10 orang (1,2%), untuk golongan II sejumlah 203 orang (25%), dan golongan I sejumlah 22 orang (2,2%) (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan	0	12	22	2	36
2	Kelurahan	4	24	46	0	74
	Total	4	36	68	2	110

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

2.2.1.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.5 sebagian besar pegawai Sekretariat Kab. Kep. Seribu adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 40 orang sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 orang, D3 sebanyak 3 (tiga) orang, SMA sebanyak 22 orang, SLTP sebanyak 4 (empat) orang dan SD sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Sekretariat Kab. Kep. Seribu Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/SPK	D3	S1	S2	
1	Bupati						1	1
2	Wakil Bupati						1	1
3	Sekretariat Kabupaten						1	1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						1	1
5	Bagian Tata Pemerintahan			1	1	6	2	10
6	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian				1	7	1	9
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1	1		9		11
8	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan						1	1
9	Bagian umum dan Protokol	1	3	15		9	1	29
10	Bagian Keuangan			1	1	4	1	7
11	Bagian Perekonomian dan Pembangunan			4		5	2	11
TOTAL		1	4	22	3	40	12	82

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sedangkan pegawai di seluruh kecamatan didominasi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 15 orang, selebihnya memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 10 orang, S2 sebanyak 6 (enam) orang, D3 sebanyak 3 (tiga) orang, SMP sebanyak 1 (satu) orang, SD sebanyak 1 (satu) orang (Tabel 2.6).

Adapun pegawai di seluruh kelurahan didominasi pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 38 orang, selebihnya memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 3 (tiga) orang, S2 sebanyak 2 (dua) orang, SMP sebanyak 4 (empat) orang, dan SD sebanyak 1 (satu) orang (Tabel 2.6).

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	D4/S1	S2	
1	Kecamatan	1	1	15	0	3	10	6	36
2	Kelurahan	1	4	38	0	3	26	2	74
	Total	2	5	53	0	6	36	8	110

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Dapat disimpulkan bahwa secara umum pegawai Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu 50% ke atas telah memiliki tingkat pendidikan S1 ke atas atau dengan kata lain pegawai Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

Namun demikian, pegawai di Kecamatan dan Kelurahan Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu masih didominasi pegawai dengan tingkat pendidikan dibawah S1, sehingga dalam perspektif kedepan perlu adanya peningkatan kemampuan, kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan dengan meningkatkan tingkat pendidikan pegawai.

2.2.1.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Saat ini jabatan struktural yang tersedia di Sekretariat Kab. Kep. Seribu seluruhnya telah terisi (Tabel 2.7). Pegawai yang menempati eselon II sebanyak 3 (tiga) orang, eselon III sebanyak 8 (delapan) orang dan eselon IV sebanyak 18 orang, sedangkan sisanya adalah fungsional pelaksana sebanyak 58 orang. Namun kebutuhan jabatan fungsional tersebut belum dipetakan, sehingga Kab. Adm. Kep. Seribu belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kab. Adm. Kep. Seribu sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	3
2	Eselon III	8
3	Eselon IV	18
4	Fungsional Tertentu	0
5	Fungsional Pelaksana	53
TOTAL		82

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sedangkan untuk kelurahan dan kecamatan seluruh jabatan struktural telah terisi, eselon III di kecamatan sejumlah 4 (empat) orang, eselon IV sejumlah 12 orang dan fungsional pelaksana sebanyak 20 orang. Adapun untuk eselon IV di kelurahan sejumlah 30 orang, kemudian untuk fungsional pelaksana di kelurahan sebanyak 44 orang. Lebih lanjut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Eselon					Jumlah
		Fungsional Pelaksana (Staf)	Fungsional Tertentu	Eselon IV	Eselon III	Eselon II	
1	Kecamatan	20	0	12	4	0	36
2	Kelurahan	44	0	30	0	0	74
	Total	64	0	42	4	0	110

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

2.2.1.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki sebesar 91,46% sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sebesar 8,54%. Kondisi demikian menggambarkan bahwa Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu tidak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi DKI Jakarta untuk variabel keterlibatan perempuan sebagai pegawai di pemerintahan. Secara numerik dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Bupati		1	1
2	Wakil Bupati		1	1
3	Sekretariat Kabupaten		1	1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1	1
5	Bagian Tata Pemerintahan		10	10
6	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	3	6	9
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	9	11
8	Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan		1	1
9	Bagian umum dan Protokol		29	29
10	Bagian Keuangan	1	6	7
11	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	1	10	11
TOTAL		7	75	82

Sumber : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi, karena 25% aset dalam kondisi rusak berat. Secara rinci dapat dilihat pada table 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu s/d Tahun 2019

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kapal Kabupaten	25	15	2	8	
2	Kendaraan roda 4	13	11		2	1 unit dititipkan di Pulomas
3	Kendaraan roda 2	16	8		8	
4	Peralatan kantor :					
	- Komputer PC	30	17	1	12	
	- Laptop	5	4		1	
	- Meja 1 Biro	0	0		0	Berada di Aset MPSA
	- Meja ½ Biro	0	0		0	Berada di Aset MPSA
	- Kursi Kerja	91	81		10	
	- Kursi Tamu	0	0		0	
	- Lemari Arsip	0	0		0	
5	Buku Perpustakaan	50	50		-	Sisanya berada di asset MPSA Buku Peraturan Perundang-undangan

Sumber : Bagian Umum dan Protokol (Per-31 Desember 2019)

2.3. Kinerja Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2013-2017

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada periode 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.11. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 19 indikator kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu seluruhnya masuk dalam kategori baik, atau dengan kata lain realisasi indikator tersebut tidak ada yang dibawah 80%.

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2013-2017

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup kota/kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%
2	Terlaksananya Koordinasi Penataan Lokasi Kaki Lima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah penataan lokasi usaha kaki lima	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah peserta pembinaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan pengetahuan hukum aparat dan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah peserta Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	100%
8	Jumlah peserta penyuluhan Hukum Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	98%	92%	91%	87%	95%
9	Jumlah perkara yang diselesaikan Pengadilan tingkat Kota/ Kab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah jenis perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah kantor camat yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Koordinasi Pelaksanaan Kota /Kab Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Penanganan perkara di Pengadilan Kota/Kab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Tertatanya keprotokolan tamu kab/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	87%	82%	98%
17	Jumlah acara Keprotokolan tingkat Kabupaten	100%	100%	100%	100%	94%	91.25%	96.19%	96.19%	95.62%	122.48%
18	Koordinasi penanggulangan kemiskinan kota/kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52.02%	100%	100%	100%
19	Persentase Aparat yang kompeten	100%	100%	100%	100%	100%	92.21%	93.21%	94.44%	95.10%	96.40%

Sumber : Tata Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2.3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran atau realisasi kinerja keuangan dalam Tabel 2.12 secara umum menunjukkan capaian yang negatif. Pada tahun 2013 1 (satu) dari 17 program (5%) memiliki realisasi dibawah 70%, tahun 2014 10 dari 37 program (27%) memiliki realisasi dibawah 70%, tahun 2015 10 dari 14 program (71%) memiliki realisasi dibawah 70%, tahun 2016 3 (tiga) dari 9 (sembilan) program (33%) memiliki realisasi dibawah 70%, dan pada tahun 2017 5 dari 10 program (50%) memiliki realisasi dibawah 70%.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dengan realisasi keuangan yang cukup rendah namun dapat mencapai target indikator kinerja yang tinggi (Tabel 2.11). Dalam perspektif perencanaan, hal ini dapat terjadi antara lain karena adanya penetapan target indikator kinerja yang terlalu pesimis, atau karena adanya penetapan target pagu keuangan yang terlalu optimis, sehingga menyebabkan penyelenggaraan program kegiatan tidak efisien.

Dalam perspektif kedepan kualitas penentuan perencanaan target indikator kinerja maupun target anggaran akan terus diperbaiki, sehingga *gap* antara serapan anggaran dengan ketercapaian target indikator kinerja dapat diminimalkan, atau setidaknya masih mendekati logis dan rasional.



Tabel 2.12 Realisasi Anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2013-2017

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	200,000,000	-	-	-	-	199,947,200	-	-	-	-	99.97%	-	-	-	-
2	Peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum	115,000,000	-	-	-	-	114,160,000	-	-	-	-	99.27%	-	-	-	-
3	Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan	100,000,000	-	-	-	-	89,025,000	-	-	-	-	89.03%	-	-	-	-
4	Program pencegahan dan penanggulangan konflik	938,000,000	-	-	-	-	937,179,300	-	-	-	-	99.91%	-	-	-	-
5	Program pendidikan politik masyarakat	100,000,000	-	-	-	-	99,944,000	-	-	-	-	99.94%	-	-	-	-
6	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2012	100,000,000	-	-	-	-	99,475,000	-	-	-	-	99.48%	-	-	-	-
7	Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	19,119,459,585	-	-	-	-	17,007,976,213	-	-	-	-	88.96%	-	-	-	-
8	Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Otonomi Daerah,	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-





NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian															
9	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,144,299,960	-	-	-	-	2,523,183,675	-	-	-	-	80.25%	-	-	-	-
10	Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi	3,906,829,703	-	-	-	-	3,733,543,700	-	-	-	-	95.56%	-	-	-	-
11	Program penetapan dan evaluasi kinerja	205,000,000	-	-	-	-	201,972,000	-	-	-	-	98.52%	-	-	-	-
12	Program peningkatan kesadaran hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)	150,000,000	-	-	-	-	149,697,000	-	-	-	-	99.80%	-	-	-	-
13	Program peningkatan pencatatan aset daerah	150,000,000	-	-	-	-	126,273,500	-	-	-	-	84.18%	-	-	-	-
14	Program keprotokolan daerah	100,000,000	-	-	-	-	9,680,000	-	-	-	-	9.68%	-	-	-	-
15	Program pengembangan destinasi pariwisata	100,000,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	175,000,000	-	-	-	-	173,463,000	-	-	-	-	99.12%	-	-	-	-
17	Program pengembangan kebijakan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan	175,360,000	-	-	-	-	169,424,000	-	-	-	-	96.61%	-	-	-	-





NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
18	Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	-	152,039,574	-	-	-	-	145,210,574	-	-	-	-	95.51%	-	-	-
19	Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian	-	423,322,746	-	-	-	-	332,983,000	-	-	-	-	78.66%	-	-	-
20	Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	-	699,291,980	-	-	-	-	697,946,180	-	-	-	-	99.81%	-	-	-
21	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	279,916,180	-	-	-	-	229,921,320	-	-	-	-	82.14%	-	-	-
22	Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	-	198,528,990	199,999,250	-	-	-	194,386,200	140,613,250	-	-	-	97.91%	70.31%	-	-
23	Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri	-	1,124,924,010	1,278,843,900	-	-	-	602,336,370	382,510,900	-	-	-	53.54%	29.91%	-	-
24	Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual	-	749,951,030	-	-	-	-	620,221,880	-	-	-	-	82.70%	-	-	-
25	Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-	797,397,956	-	-	-	-	607,683,592	-	-	-	-	76.21%	-	-	-
26	Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah	-	3,330,222,695	-	-	-	-	1,684,450,970	-	-	-	-	50.58%	-	-	-
27	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan	-	150,000,000	-	-	-	-	149,550,000	-	-	-	-	99.70%	-	-	-





NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	dan SDM Aparatur															
28	Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah	-	499,480,950	5,733,383,924	-	-	-	190,942,400	2,476,440,952	-	-	-	38.23%	43.19%	-	-
29	Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten	-	5,834,652,333	1,596,038,650	69,850,000	-	-	4,040,565,653	106,144,400	29,760,000		-	69.25%	6.65%	42.61%	
30	Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten	-	3,100,000,000	1,799,995,575	2,959,616,061	168,017,076	-	2,599,858,950	1,091,720,860	2,500,675,000	151,955,050	-	83.87%	60.65%	84.49%	90.44%
31	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten	-	499,778,070	-	-	7,248,000	-	490,262,070	-	-	-	-	98.10%	-	-	-
32	Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten	-	1,198,564,445	-	263,985,000	-	-	991,622,600	-	216,210,000	-	-	82.73%	-	81.90%	-
33	Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten	-	500,000,000	349,999,250	-	-	-	0	189,901,000	-	-	-		54.26%	-	-
34	Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten	-	1,220,437,464	5,196,785,391	-	-	-	982,343,950	3,694,341,600	-	-	-	80.49%	71.09%	-	-
35	Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten	-	248,601,499	-	-	-	-	226,877,500	-	-	-	-	91.26%	-	-	-
36	Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten	-	848,608,032	-	185,361,625	385,567,600	-	432,108,800	-	184,066,779	346,223,958	-	50.92%	-	99.30%	89.80%
37	Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten	-	249,578,600	4,484,337,520	-	-	-	249,578,600	3,523,573,350	-	-	-	100.00%	78.58%	-	-



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 2017-2022



NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
38	Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	-	3,499,973,579	-	-	-	-	444,806,799	-	-	-	-	12.71%	-	-	-
39	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	99,839,990	-	-	-	-	98,339,990	-	-	-	-	98.50%	-	-	-
40	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	-	173,186,440	-	-	-	-	168,186,440	-	-	-	-	97.11%	-	-	-
41	Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah	-	49,266,687	-	-	-	-	46,530,000	-	-	-	-	94.45%	-	-	-
42	Program Pendidikan dan Pelatihan	-	449,837,000	-	-	-	-	112,120,000	-	-	-	-	24.92%	-	-	-
43	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	299,528,348	-	-	-	-	199,331,598	-	-	-	-	66.55%	-	-	-
44	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol pp	-	600,000,000	-	-	-	-	225,776,000	-	-	-	-	37.63%	-	-	-
45	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	-	27,475,417,600	-	-	-	-	12,033,808,513	-	-	-	-	43.80%	-	-	-
46	Program Pengelolaan Rumah Dinas	-	2,745,810,030	-	-	-	-	702,643,578	-	-	-	-	25.59%	-	-	-
47	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	-	8,847,557,906	-	-	-	-	6,202,520,625	-	-	-	-	70.10%	-	-	-
48	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	-	548,885,192	-	-	-	-	492,780,350	-	-	-	-	89.78%	-	-	-
49	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	2,359,017,056	-	-	-	-	1,889,579,958	-	-	-	-	80.10%	-	-	-
50	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	-	2,134,971,420	-	-	-	-	1,522,308,260	-	-	-	-	71.30%	-	-	-



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 2017-2022



NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
	Daya Aparatur															
51	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Pembangunan SKPD	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	100.00%	-	-	-
52	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD	-	2,079,986,218	-	-	-	-	594,187,940	-	-	-	-	28.57%	-	-	-
53	Program Pengembangan Data/Informasi SKPD	-	50,000,000	-	-	-	-	49,601,073	-	-	-	-	99.20%	-	-	-
54	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	-	3,394,886,300	-	-	-	-	2,804,156,377	-	-	-	-	82.60%	-	-	-
55	Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah	-	1,669,992,249	-	-	-	-	1,627,406,499	-	-	-	-	97.45%	-	-	-
56	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	149,999,940	-	-	-	78,151,400	-	-	-	-	-	52.10%	-	-
57	Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	749,878,000	-	-	-	155,980,300	-	-	-	-	-	20.80%	-	-
58	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	-	-	4,497,745,164	6,944,141,685	11,746,154,794	-	-	2,164,660,198	5,597,280,943	8,923,589,404	-	-	48.13%	80.60%	75.97%





NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
59	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	-	-	21,129,836,971	20,822,788,972	5,256,287,300	-	-	2,947,510,370	14,920,184,279	2,799,048,996	-	-	13.95%	71.65%	53.25%
60	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	-	-	498,023,650	-	-	-	-	43,060,700	-	-	-	-	8.65%	-	-
61	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	-	-	147,540,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0.00%	-	-
62	Program Pengelolaan Rumah Dinas Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	-	-	-	713,935,480	3,516,936,603	-	-	-	535,694,600	1,285,430,000	-	-	-	75.03%	36.55%





NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
63	Persandian Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	-	-	-	98,200,410	-	-	-	-	49,450,000	-	-	-	-	50.36%	-
64	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian	-	-	-	3,214,365	-	-	-	-	1,904,000	-	-	-	-	59.23%	-
65	Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi	-	-	-	-	397,039,500	-	-	-	-	262,059,040	-	-	-	-	66.00%
66	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM	-	-	-	-	777,199,995	-	-	-	-	703,725,000	-	-	-	-	90.55%
67	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	-	-	-	237,485,000	-	-	-	-	155,420,000	-	-	-	-	65.44%
68	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	-	-	-	-	244,275,240	-	-	-	-	195,082,800	-	-	-	-	79.86%





NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
69	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-	-	700,200,000	-	-	-	-	682,200,000	-	-	-	-	97.43%

Sumber : Bagian Keuangan



2.4 Tantangan dan Peluang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menuntut adanya peningkatan peran, kewenangan dan kapasitas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Kepulauan Seribu, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur, antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

2.4.1.1 Bencana Alam

Perubahan iklim dunia berdampak terhadap kondisi wilayah di belahan dunia. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu rawan bencana angin puting beliung. Pada tahun 2012 tercatat 500 rumah rusak diterpa angin puting beliung, pada tahun 2016 menurun menjadi 177 rumah rusak, dan di tahun 2017 menjadi 55 rusak diterpa angin puting beliung. Meskipun terjadi penurunan tren kerugian rumah rusak, namun bencana ini datang setiap tahun.

Lebih lanjut Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga rawan terhadap banjir rob, dimana pada tahun 2016 banjir rob merusak akses jalan menuju kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, dan pada tahun 2017 banjir rob mengakibatkan Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung dan Pulau Lancang terendam dengan ketinggian 20-50 cm.

Dengan demikian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kesiapsiagaan agar dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana dapat ditekan.

2.4.1.2 Kerusakan Lingkungan

Seiring dengan pertambahan aktifitas masyarakat, khususnya bidang kepariwisataan berpotensi berdampak terhadap kerusakan lingkungan sekitar. Pada tahun 2013 berdasarkan hasil pemantauan Tim Ekspedisi Fortuga ITB diketahui adanya kerusakan terumbu karang di Pulau Pari. Hal tersebut diakibatkan oleh polusi sampah. Selain itu adanya fenomena abrasi yang dipicu oleh penebangan hutan bakau yang tidak terkontrol mengakibatkan luas pulau semakin menyusut dan beberapa bagian pulau terendam. Dengan demikian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sehingga dampak kerugian terhadap lingkungan dari aktifitas pariwisata dapat diminimalisir.

2.4.1.3 Keterbatasan Air Bersih dan Listrik

Ketersediaan air bersih dan listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Seribu yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi keterbatasan listrik terlihat jelas di Pulau Sabira. Pulau Sabira merupakan wilayah pemukiman penduduk yang secara geografis letaknya paling jauh dari Ibukota Jakarta. Pasokan listrik di wilayah tersebut masih menggunakan Mesin Genset untuk mengaliri listrik satu pulau dengan luas pulau 8,82 Ha sehingga penggunaannya sangat dibatasi.

Keterbatasan air bersih untuk mandi maupun air layak konsumsi hampir terjadi di seluruh pulau pemukiman penduduk. Kondisi yang sangat memprihatinkan terlihat di Pulau Panggang dan Pulau Kelapa dengan kadar

garam air tanah yang sangat tinggi sehingga tidak layak dimanfaatkan untuk mandi maupun konsumsi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UKPD terkait telah berupaya membangun *Reverse Osmosis (RO)* di sejumlah pulau pemukiman, namun debit air bersih yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan belum dapat menjangkau seluruh pulau pemukiman. Berdasarkan data dari Bagian Ekbang Tahun 2017, kondisi *existing* Instalasi Pengolahan Air *Reverse Osmosis (IPA-RO)* di Kepulauan Seribu sebagai berikut :

Tabel 2.13 Kondisi Instalasi Pengolahan Air *Reverse Osmosis (IPA-RO)* di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017

No.	Lokasi	Tahun dibangun	Kapasitas Produksi (Ltr/mnt)	Keterangan
1.	Pulau Pramuka	2004	25	Beroperasi
2.	Pulau Karya (SWRO)	2014	150	Beroperasi
3.	Pulau Panggang	2002	28	Beroperasi
4.	Pulau Kelapa	1996	24	Beroperasi
5.	Pulau Kelapa Dua	2002	20	Beroperasi
6.	Pulau Harapan	2003	18	Beroperasi
7.	Pulau Pari	2002	20	Beroperasi
8.	Pulau Lancang	2002	30	Beroperasi
9.	Pulau Tidung Besar	2002	28	Beroperasi
10.	Pulau Untung Jawa	1993	28	Beroperasi
11.	Pulau Untung Jawa (SWRO KemenPUPR)	2016	150	Belum Beroperasi
12.	Pulau Sabira	2013	4	Belum Serah Terima

Sumber : Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setkab. Adm. Kep. Seribu Tahun 2017

Selain data di atas, jumlah kapasitas produksi dan kebutuhan daya listrik pembangunan IPA-SWRO di Kepulauan Seribu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14 Jumlah Kapasitas Kondisi Produksi dan Kebutuhan Daya Listrik Pembangunan Instalasi Pengolahan Air *Sea Water Reverse Osmosis (IPA-SWRO)* di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017

No.	Lokasi	Kapasitas RO (m ³)	Daya (KVA)	Keterangan
1.	Pulau Kelapa-Harapan	900	443	Terhenti
2.	Pulau Tidung	700	311	Terhenti
3.	Pulau Panggang	500	231	Dilanjutkan
4.	Pulau Lancang	250	131	Terhenti
5.	Pulau Pramuka	250	131	Dilanjutkan
6.	Pulau Kelapa Dua	100	86	Dilanjutkan
7.	Pulau Sabira	10	50	Terhenti
8.	Pulau Payung	10	50	Dilanjutkan

Sumber : Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setkab. Adm. Kep. Seribu Tahun 2017

Menyikapi data dan penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UKPD terkait perlu menyusun kegiatan strategis dalam peningkatan penyediaan air bersih layak konsumsi dan peningkatan penyediaan listrik di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. Dengan demikian upaya tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pemerataan pembangunan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Administrasi dengan 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.

2.4.1.4 Kondisi Transportasi dan Dermaga

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai salah satu dari 10 Destinasi Utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) harus mampu menjawab beberapa tantangan pencapaian indikator-indikator strategis pengembangan KSPN. Salah satunya adalah melalui peningkatan aksesibilitas (kemudahan akses transportasi dan dermaga) bagi wisatawan maupun bagi masyarakat.

Ketersediaan jumlah transportasi umum milik swasta dari dan menuju ke Kepulauan Seribu beberapa tahun terakhir ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Akses kapal menuju Kepulauan Seribu dapat ditempuh melalui Dermaga Marina Ancol, Muara Angke/Kaliadem, Kamal Muara, Tanjung Pasir, Sunda Kelapa, Keronjo dan Rawasaban. Dilihat dari segi estetika fisik bangunan dermaga-dermaga tersebut mayoritas besar dinilai masih kurang tertata rapi sebagaimana konsep pelabuhan kawasan pariwisata. Menyikapi hal tersebut, perlu koordinasi lintas SKPD/UKPD terkait untuk menyusun upaya strategis dalam peningkatan segi fisik dermaga yang representatif dan inovatif serta menyusun jadwal pelayaran kapal.

Akses pelayaran lintas pulau pemukiman melalui konsep Trans Pulau Seribu perlu diupayakan oleh Pemerintah mengingat masyarakat di sejumlah pulau pemukiman terkendala akses pelayaran kapal antar pulau pemukiman sehingga tidak jarang masyarakat menyewa kapal. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pengoperasian *air strip* di Pulau Panjang sebagai alternatif pintu masuk destinasi wisata Kepulauan Seribu dengan konsep *one gate service* (terintegrasi antara dermaga dan bandara).

2.4.1.5 Kondisi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

Berdasarkan data Suku Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017, tercatat jumlah rata-rata sampah di Kepulauan Seribu sebanyak 50 ton/hari dengan persentase 70% merupakan sampah plastik. Sampah tersebut berasal dari penduduk Kepulauan Seribu, wisatawan Kepulauan Seribu serta berasal dari 13 muara sungai di wilayah sekitar yang terbawa arus laut menuju kawasan perairan Kepulauan Seribu. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi sampah anorganik di Kepulauan Seribu tergolong cukup memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut, SKPD/UKPD terkait perlu melakukan koordinasi dan menyusun upaya strategis dalam

peningkatan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan Kepulauan Seribu. Misalnya melalui pengadaan alat pemusnah sampah (L-BOX dan INCENERATOR), pengadaan alat komposting sampah organik, program bank sampah, pengolahan biji plastik, daur ulang sampah maupun peningkatan operasional petugas kebersihan dan optimalisasi kapal pengangkut sampah.

2.4.1.6 Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan data dari Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik tahun 2017, Fasilitas jaringan komunikasi berupa *BTS (Base Transceiver Station)* telah terpasang di sejumlah pulau pemukiman diantaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua dan Pulau Harapan. Pulau yang belum terpasang jaringan komunikasi dan informasi *BTS* antara lain Pulau Sabira dan Pulau Payung. Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kepulauan Seribu perlu melakukan percepatan dan pemerataan jaringan komunikasi khususnya internet di seluruh wilayah Kepulauan Seribu serta perlu optimalisasi kualitas jaringan komunikasi *BTS* yang telah terpasang.

2.4.1.7 Kondisi Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan di Kepulauan Seribu cukup terpenuhi namun perlu upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan pangan secara menyeluruh yang menjangkau pulau-pulau pemukiman maupun pulau-pulau resort. Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Pulau Tematik Pertanian dan Perkebunan (Pulau Tidung Kecil/Agro Wisata);
- b. Pulau Tematik Pasar Tradisional (Pulau Untung Jawa dan Pulau Tidung);



- c. Pusat Cinderamata Kepulauan Seribu;
- d. Pulau Sentra Industri Pengolahan Ikan, Rumput Laut, Rajungan dan Garam (Pulau Sebira, Pulau Lancang dan Pulau Tidung);
- e. Penyimpanan Ikan Segar (*Cold Storage*) di seluruh Pulau Pemukiman.

Upaya optimalisasi kebutuhan pangan tersebut perlu diperjuangkan untuk menciptakan pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

2.4.2 Peluang

2.4.2.1 Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

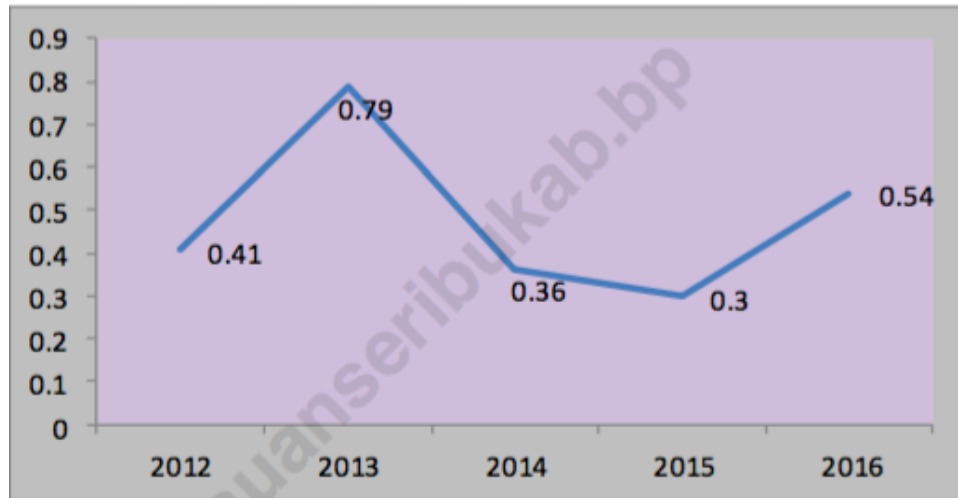
Adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Lebih lanjut, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta juga menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Keputusan Gubernur tersebut mengatur berbagai kewenangan yang dilimpahkan dan atau tetap berada di tingkat Provinsi. Dalam hal kewenangan yang dilimpahkan kepada Kabupaten adalah kewenangan pelayanan publik yang bersifat koordinasi, pelaksanaan tugas perangkat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pembinaan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.



2.4.2.2 Potensi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi secara riil berdasarkan perkembangan PDRB atas harga konstan pada periode 2015-2016 menunjukkan perkembangan yang positif.



Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Konstan

Sumber : BPS Kepulauan Seribu

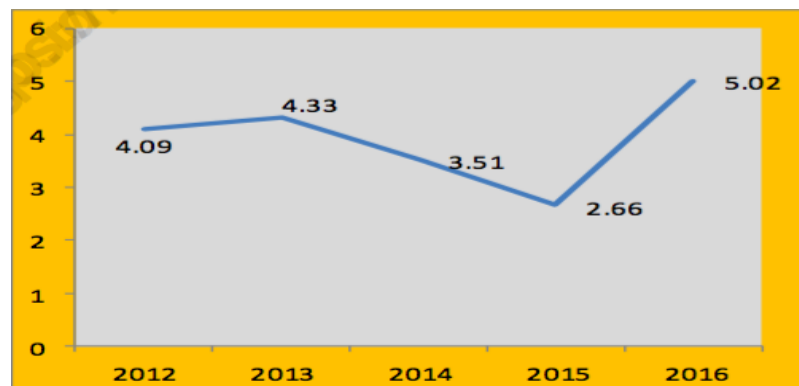
Meski volume produksi minyak turun pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Seribu mampu mencapai 0,54 persen, lebih pesat dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 yang mencapai 0,30 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa, sektor lain selain pertambangan, telah tumbuh cukup signifikan. Seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2016 masing-masing lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertambangan.

Pada tahun 2016, sebagian besar sektor ekonomi di Kepulauan Seribu mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Lapangan usaha industri pengolahan sebagai lapangan usaha yang berkontribusi cukup besar, telah tumbuh 8,64 persen pada tahun 2016, lebih cepat dibandingkan tahun 2015 yang hanya mampu tumbuh sebesar 6.83

persen. Lapangan usaha lain yang kontribusi besar dan mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2016 adalah lapangan usaha Perdagangan dan Penyedia akomodasi, makan, minum masing – masing telah tumbuh 9,93 persen dan 6,51 persen.

Sedangkan sektor lainnya juga tumbuh cepat diantaranya lapangan usaha transportasi dan pergudangan 6,34 persen; lapangan usaha informasi dan komunikasi 13,87 persen; lapangan usaha jasa pendidikan 8,41 persen; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial 8,90 persen; serta lapangan usaha jasa lainnya 8,10 persen pada tahun 2016.

Untuk melihat perkembangan perekonomian rakyat secara riil, dapat dilihat PDRB Kepulauan Seribu tanpa kegiatan produksi minyak dan gas. Pertumbuhan ekonominya selama tahun 2012 sampai dengan 2016 antara 2,06 sampai 5,22 persen. Terendah pada tahun 2015 dan tertinggi pada tahun 2016.



Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Seribu Tanpa Migas (%)

Sumber : BPS Kepulauan Seribu

Berdasarkan uraian tersebut pertumbuhan perekonomian di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi peluang sebagai pendongkrak kemajuan pembangunan di Kepulauan Seribu.

2.4.2.3 Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bermakna terdapat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk merespon dan berkontribusi terhadap hal-hal terkait pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam konteks partisipasi pemilihan umum, data KPU Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kepulauan Seribu merupakan yang tertinggi se-Provinsi DKI Jakarta, yakni mencapai 81% dari total pemilih.

Kemudian dalam konteks partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), jumlah usulan dalam musrenbang menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat terdapat 438 usulan, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.506 usulan. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kepedulian masyarakat dalam berkontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Adanya partisipasi masyarakat ini menjadi peluang sebagai modal sosial dalam mewujudkan Jakarta yang *Maju Kotanya, Bahagia Warganya*.

Partisipasi masyarakat juga terlihat dari berbagai sektor kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Seribu sebagaimana dapat dilihat dari data Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.15 Sektor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017

No	Sektor	Jenis
1.	Industri / Ekonomi	Perdagangan IKM (makanan, kerajinan dan pembuatan kapal) Pengelolaan hasil laut Daur Ulang oleh UP2K

2.	Pariwisata	Usaha Penginapan / home stay Biro Perjalanan / Travel Transportasi Catering Pokdarwis / Pemandu Wisata Penyewaan Peralatan Selam/ snorkeling
3.	Pendidikan	Bimtek Bagi Pelaku Usaha Diklat Nakhoda Diklat Ketrampilan dan Keahlian
4.	Seni dan Kebudayaan	Hadrah Qasidah Marawis Tarian (Khas dari masing – masing pulau pemukiman)

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab. Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2018

2.4.2.4 Potensi Pariwisata

Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025. Lebih lanjut, berdasarkan Rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019 Kementerian Pariwisata, dapat diketahui bahwa Kepulauan Seribu termasuk wilayah yang menjadi lokasi pembangunan destinasi pariwisata prioritas.

Dalam rencana tersebut Kepulauan Seribu dan sekitarnya diarahkan sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan bahari dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem yang mampu menarik kunjungan 500 ribu wisman pada tahun 2019, dengan target wisman dari Negara Cina, Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, Amerika, Inggris, Hongkong, Belanda, Jerman, dan Brunei Darussalam. Adapun strategi pengembangan dilakukan dengan cara :

1. Untuk mempertinggi konektivitas diperlukan pengoperasian Air Strip di Pulau Panjang sebagai alternatif pintu masuk destinasi, juga diperlukan peningkatan dari segi fisik dermaga & jadwal pelayaran kapal di Muara Angke, Muara Kamal & Marina Ancol;
2. Perlunya pembangunan hotel & resort yang berstandar internasional yang memperhatikan kebersihan dan sanitasi, namun tetap menonjolkan ciri khas dari masing-masing pulau. Pembangunan sarana kesehatan dan layanan makan minum berstandar internasional di setiap pulau utama. Perlunya peningkatan kualitas dari air bersih, jaringan listrik, dan internet untuk mendukung kegiatan wisatawan;
3. Perlunya pengembangan lokasi snorkeling & diving, menjadikan wildlife watching sebagai atraksi baru, dan penyelenggaraan event-event budaya Kepulauan Seribu.

Sedangkan penentu keberhasilan (*Key Success Factors*) ditentukan sebagai berikut :

1. Pengoperasian air strip di Pulau Panjang;
2. Revitalisasi fisik dermaga di ketiga pelabuhan eksisting (Marina Ancol, Muara Angke, dan Muara Kamal) dan penambahan jadwal pelayaran per hari;
3. Pembentukan Kepulauan Seribu Tourism Board;
4. Penyelenggaraan event wisata budaya rutin;
5. Peningkatan kualitas amenities dengan konsep “*One Island, One Resort*”.

Dalam mendukung Rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam RPJMD Tahun 2017-2022 menyusun arah pengembangan Kepulauan Seribu, antara lain meliputi penataan kawasan :

1. Penataan Kawasan Pulau Pramuka, meliputi :
 - a. Penataan kanopi dan pohon peneduh sekitar dermaga Kabupaten;
 - b. Penataan dan pembangunan sentra kuliner dan sentra atraksi wisata olahraga air di Dermaga Timur;
 - c. Mengoptimalkan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah ada;
 - d. Pembangunan toilet wisata bertaraf internasional;
 - e. Pembangunan floating deck di sisi barat dan sisi timur Pulau Pramuka;
 - f. Pembangunan floating deck untuk menikmati hutan mangrove;
 - g. Penataan streetscape dan streetfurnitur bernuansa alam;
 - h. Pembangunan signage;
 - i. Pembangunan tanggul dan dermaga sisi timur;
 - j. Pembangunan pengelolaan air dengan Sea Water Reverse Osmosis yang terkoneksi dengan perpipaan ke rumah-rumah penduduk;
 - k. Pemeliharaan pengelolaan IPAL;
 - l. Penyediaan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan yang lokasinya terpisah dengan permukiman;
 - m. Beutifikasi penerangan tempat umum;
 - n. Penanaman dan rehabilitasi mangrove;
 - o. Pembuatan lumbung ikan sebagai tempat wisata mancing;
 - p. Peningkatan gang hijau;
 - q. Penanaman pohon untuk penghijauan;
 - r. Peningkatan aktifitas kerajinan masyarakat;
 - s. Peningkatan aktivitas budaya masyarakat;
 - t. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan
 - u. Pembangunan sarpras teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.



2. Penataan Kawasan Pulau Panggang, meliputi :
 - a. Revitalisasi pelabuhan dan dermaga utama di pulau panggang;
 - b. Pembangunan pengelolaan air minum dengan SWRO;
 - c. Pemeliharaan pengelolaan IPAL;
 - d. Beutifikasi penerangan;
 - e. Penanaman mangrove;
 - f. Pembuatan lumbung ikan;
 - g. Peningkatan gang hijau dan penanaman pohon;
 - h. Penataan streetscape dan street furniture;
 - i. Membangun signage;
 - j. Merevitalisasi kampung;
 - k. Pembangunan gazebo;
 - l. Pembangunan sentra kuliner;
 - m. Peningkatan fungsi gedung karang taruna;
 - n. Pembangunan toilet bertaraf internasional;
 - o. Pemugaran dan memfungsikan gedung eks kedewanaan sebagai museum, peningkatan aktivitas kerajinan dan budaya masyarakat;
 - p. Merevitalisasi makam Habib Ali sebagai objek wisata rohani;
 - q. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
 - r. Peningkatan aktivitas kerajinan dan budaya masyarakat; dan
 - s. Pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi yang handal.
3. Penataan Kawasan Pulau Tidung Besar Meliputi,
 - a. Pembangunan dermaga dan kolam labuh di sisi selatan dan utara bagian barat;
 - b. Revitalisasi dermaga utama agar sesuai dengan kebutuhan pariwisata;
 - c. Membangun floating deck;



- d. Pembangunan dan perbaikan jalan menuju sisi barat pulau Tidung Besar;
- e. Penataan dan pembangunan sentra kuliner;
- f. Membangun toilet wisatawan bertaraf internasional;
- g. Penataan streetscape dan street furniture;
- h. Pembangunan signage;
- i. Pembangunan docking kapal;
- j. Pembangunan SWRO;
- k. Pengelolaan IPAL;
- l. Penyediaan dan pengelolaan sampah;
- m. Beutifikasi tempat umum;
- n. Penanaman mangrove;
- o. Pengembangan dan pengelolaan pertanian rumput laut,
- p. Pembuatan lumbung ikan sebagai tempat memancing;
- q. Penanaman pohon sebagai penghijauan;
- r. Meningkatkan aktivitas kerajinan masyarakat;
- s. Meningkatkan budaya masyarakat;
- t. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- u. Merevitalisasi makam Raja Tidung sebagai objek wisata rohani;
- v. Penataan lapangan sepak bola dan saraga lainnya;
- w. Restorasi pantai dan membangun sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi.

Lebih lanjut, perkembangan jumlah wisman dalam kurun waktu 2012-2016 terjadi peningkatan, dari semula di tahun 2012 sebesar 16,384 orang, menjadi 20,932 orang di tahun 2016, dengan penerimaan devisa wisman sebesar USD 16,384,000. Meskipun demikian kunjungan wisatawan wisman dan domestik mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar 1,500,504 orang dan menjadi 906,257 di tahun 2017.

Tabel 2.16 Kunjungan Wisatawan Kepulauan Seribu 2012-2016

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	Jumlah Wisatawan Domestik (orang)	Jumlah Total (orang)
2012	16,384	1,484,120	1,500,504
2014	14,995	2,105,063	2,120,058
2015	10,836	801,421	812,257
2016	20,932	759,027	779,004
2017	24,217	882,040	906,257

Sumber : 2012-2016 BPS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Tahun 2017 Sudin Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Seribu

Arah pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata internasional dan nasional, serta arah penataan wilayah yang tercantum dalam RPJMD menjadi peluang bagi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk dapat meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Perumusan isu-isu strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Janji Kerja Gubernur serta Wakil Gubernur, kemudian dilakukan telaah arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Analisis tahapan-tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2017-2022. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sebagaimana Tabel 2.12 tentang pencapaian kinerja pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2013-2017 pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari adanya pencapaian kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang belum mencapai target, sehingga terdapat *gap* atau permasalahan yang perlu diberikan solusi. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan Makro Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berbeda dengan wilayah kabupaten lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Bupati beserta perangkatnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Makro Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurang responsif dalam menyelesaikan tantangan dan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat spontan dan lintas urusan, serta belum dapat secara cepat dan mandiri melakukan penataan dan pengembangan kawasan sesuai dengan peluang-peluang yang ada.	1. Masih adanya rantai koordinasi yang panjang dengan Perangkat Daerah lain dalam menyelesaikan masalah dan kurangnya kewenangan kabupaten administrasi terhadap beberapa pelayanan (perizinan, dst) mengakibatkan	1. Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2007 Tentang SOTK Kabupaten (Bupati Hanya Bersifat Koordinatif); 2. Peraturan Pembatasan Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Pergub 267 Tahun 2016 Dengan Pelimpahan Sebagian (10) Kewenangan Gubernur Yang Bersifat Teknis

	terhambatnya peluang untuk kemajuan wilayah; 2. Adanya <i>delay time</i> antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan pemerintah;	Kewenangan Kabupaten Terbatas (Perizininan, Amdal DII); 3. Grand Design Kepulauan Seribu Pariwisata; 4. Zonasi Pemanfaatan Perairan; 5. Banyaknya Pemilik Kewenangan Dalam Pengelolaan Kepulauan Seribu (KLHK, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemen KKP).
--	---	---

B. Permasalahan Pelayanan di Bagian – Bagian Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dalam konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 diketahui bahwa penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, sehingga solusi-solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan. Pada bagian ini dijabarkan permasalahan-permasalahan berdasarkan bidang-bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Bagian Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bangunan kantor kecamatan, kelurahan dan rumah dinas serta fasilitas pendukungnya	1. Melakukan pembangunan dan rehab fasilitas kantor camat, lurah, dan rumah dinas serta fasilitas pendukung lainnya

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		2. Masih lemahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	1. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LMK, FKDM melalui pembinaan, dialog, dst.
		3. Masih perlunya optimalisasi pemantauan, pengendalian dan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	1. optimalisasi pemantauan, pengendalian dan penanganan gangguan tantrib
		4. Masih perlunya peningkatan kualitas penanggulangan bencana dan penertiban umum	1. Mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana dan koordinasi penertiban umum
		5. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan	1. Mengoptimalkan pembinaan dan evaluasi terhadap kecamatan dan kelurahan;
		6. Belum Optimalnya pelayanan terkait kesehatan, Pelaksanaan Kabupaten sehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, Pemberdayaan perempuan dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat kabupaten	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kota Sehat di kabupaten, Kota Layak Anak, Pelaksanaan BOP dan BOS; 2. Mengoptimalkan Pembinaan Pemberdayaan perempuan; 3. Mengoptimalkan pelaksanaan PSN; 4. Mengoptimalkan pelayanan Keagamaan (MTQ)
2	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	1. Masih perlu peningkatan kualitas pelayanan di bidang hukum; 2. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia	1. Mengoptimalkan pelayanan pengurusan perkara di tingkat Kabupaten; 2. Mengoptimalkan pelayanan sengketa pertanahan di tingkat kabupaten; 3. Mengoptimalkan usaha peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia
		3. Belum optimalnya disiplin aparat;	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi;

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		4. Masih belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan di Kabupaten administrasi, kelurahan dan kecamatan	1. Penyusunan, Pembinaan serta Pendampingan SOP di Kantor Sekretariat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan
3	Bagian Umum dan Protokol	1. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan keprotokolan dan penyelenggaraan jamuan resmi
		2. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks kepuasan pelayanan kantor dan indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	1. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pencapaian indeks kepuasan pelayanan kantor dan indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional
4	Bagian Keuangan	1. Masih perlu dioptimalkannya kualitas pelayanan keuangan	1. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan terhadap PA/KPA, PPK OPD dan PPTK OPD; 2. Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu; 3. Peningkatan tindak lanjut pemeriksaan administrasi keuangan; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
5	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	1. Masih perlu dioptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sarpras koperasi, UMKM dan perdagangan.	1. Dilakukan pembangunan, rehab ringan, rehab sedang, rehab berat dan perencanaan rehab sarpras koperasi, UMKM dan perdagangan;
		2. Masih perlu dioptimalkan koordinasi dan monev terhadap SKPD/UKPD yang menjadi mitra Bidang Perekonomian	1. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kab. Adm. Kep. Seribu
			2. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang kepariwisataan dan ketenagakerjaan tingkat Kab. Adm. Kep. Seribu 3. Mengoptimalkan koordinasi,

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			pengendalian dan evaluasi bidang usaha kecil dan menengah, perdagangan serta ketahanan pangan Kab. Adm. Kep. Seribu
			4. Mengoptimalkan koordinasi, pengendalian dan evaluasi bidang perhubungan, perindustrian dan energi Kab. Adm. Kep. Seribu
			5. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kab. Adm. Kep. Seribu
6	Unit Kerja Teknis 1	1. Belum Optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan
			2. Mengoptimalkan penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas terkait pelayanan sosial
			3. Mengoptimalkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
		2. Belum optimalnya prasarana dan sarana keolahragaan serta penyelenggaraan kegiatan kepemudaan tingkat Kabupaten Administrasi;	1. Mengoptimalkan penyediaan prasarana dan sarana olahraga di wilayah Kabupaten Administrasi;
			2. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan kepaskibrakaan dan kepemudaan di wilayah Kabupaten Administrasi serta partisipasi event tingkat Provinsi
		3. Belum optimalnya penyelenggaraan keperpustakaan masyarakat di tingkat Kabupaten, kecamatan dan kelurahan	1. Mengoptimalkan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, serta Perpustakaan Masyarakat
			2. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum Kepulauan

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			Seribu
			3. Mengoptimalkan pelaksanaan event Keperpustakaan tingkat Kabupaten maupun tingkat provinsi
7	Unit Kerja Teknis 2	1. Masih belum optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan pemakaman.	1. Mengoptimalkan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
			2. Mengoptimalkan Pembangunan maupun Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
		2. Masih belum optimalnya Sarana Pendukung Pencahayaan Kota	1. Mengoptimalkan Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota
			2. Mengoptimalkan Penyediaan Armatur dan Komponen Pencahayaan Kota
			3. Mengoptimalkan Penyediaan Ornamen Pencahayaan Kota yang mendukung KSPN
		3. Masih belum optimalnya Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten	1. Mengoptimalkan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
			2. Mengoptimalkan Pengecekan Keamanan Struktur Jalan Secara Berkala
8	Kecamatan	1. Masih perlu optimalisasi teknis pelaksanaan musrenbang, optimalisasi kualitas FKDM, kegiatan keolahragaan dan kebudayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban,	1. Mengoptimalkan pelaksanaan musrenbang kecamatan; 2. Mengoptimalkan kinerja FKDM; 3. Mengoptimalkan pelayanan ketentraman dan ketertiban; 4. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan dan kebudayaan tingkat kecamatan.
9	Kelurahan	1. Masih perlu ditingkatkan	1. Mengoptimalkan peningkatan

No	Bagian	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban, peningkatan peran RT,RW,LMK, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu, PSN) dan peningkatan kinerja PPSU	peran kelembagaan RT,RW, LMK; 2. Mengoptimalkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat; 3. Mengoptimalkan koordinasi dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan; 4. Mengoptimalkan koordinasi pelayanan kesehatan; 5. Mengoptimalkan penanganan prasarana sarana umum.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat.

Sesuai dengan arahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Adapun penjelasan Misi dijabarkan sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas

pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya

kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan ahlak. Hal ini berarti Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan dalam substansi sosial kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2017-2022 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2017-2022 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Adapun dalam misi tersebut, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengemban misi nomor 3 yakni *“Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas”*. Untuk mengetahui hambatan dan

faktor penentu keberhasilan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam mewujudkan Misi RPJMD, diuraikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam Mewujudkan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Hambatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas	1. Belum optimalnya disiplin aparat; 2. Belum Optimalnya output dari fungsi pembinaan, koordinasi yang dilakukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 3. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan masyarakat	1. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, kinerja pembangunan dan kinerja organisasi di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi; 3. Mengoptimalkan fungsi koordinasi; 4. Mengoptimalkan upaya pembinaan kelembagaan masyarakat

3.2.3 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur

Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimandatkan oleh warga Jakarta merupakan unsur pokok dalam menyusun program dan kegiatan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Adapun 23 janji kerja dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk kelompok belajar Paket A, B, C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu;
2. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama;
3. Membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru;
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha;
5. Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang;
6. Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta;
7. Membangun pemerintahan yang bersih, modern, melayani berbasis transparansi, akuntabilitas, dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*);

8. Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95%, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
9. Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah;
10. Memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif, melakukan pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga;
11. Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri;
12. Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman, merevitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban;
13. Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkauan transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem

transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta;

14. Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri, dengan menyediakan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya dan menjadikan sebagai pusat inovasi konservasi ekologi;
15. Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran Jakarta, serta membangun Taman Pintar (*Science Park*);
16. Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan, antara lain dengan membangun Taman Benyamin Sueb, menyelamatkan dan merevitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan Film Nasional;
17. Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta sepanjang tahun untuk mengembangkan pembinaan olahraga dan kesenian berbasis komunitas;
18. Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga, menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (*urban farming*); melakukan audit berkala keamanan kampung, serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
19. Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu;

20. Merevitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai bagian dari program pengembangan Posyandu dan Posbinidu;
21. Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu;
22. Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas;
23. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.

3.3 Telaah Arah Kebijakan Kewilayahan Kepulauan Seribu Berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 Yang Menjadi Isu Strategis didalam Pengembangan Kepulauan Seribu

Perlu digaris bawahi bahwa perumusan isu-isu strategis dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan kata lain isu yang terumuskan adalah isu-isu yang dapat menjadi diberikan solusi oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai kewenangannya. Dalam hal ini perumusan isu strategis sangat menghindari munculnya isu-isu yang tidak dapat diberikan solusi oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, telaahan visi, misi, dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD dapat disintesis beberapa aspek dan permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.



Ditinjau dari berbagai dimensi telaahan yang telah dilakukan, dapat disintesis aspek dan permasalahannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Lebih lanjut disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Pelayanan Publik	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan; Belum optimalnya pelayanan terhadap UKM, kewirausahaan baru, Pelayanan Ketenagakerjaan, penanggulangan PMKS; Belum Optimalnya pelayanan terkait penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan Kota sehat, kota layak anak, Pelaksanaan BOP dan BOS, pelaksanaan posyandu, kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan masih perlu ditingkatkannya kualitas pelayanan kegiatan keagamaan tingkat	Peningkatan kualitas pelayanan publik Kab. Adm. Kep. Seribu;

		kabupaten; Belum optimalnya penyediaan, rehab, sarana prasarana koperasi, umkm dan perdagangan; Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana publik untuk masyarakat.	
2	Koordinasi dan Monitoring	Belum optimalnya peluang usaha ekonomi; Belum optimalnya pengawasan/pengembangan aktifitas ekonomi; Belum optimalnya penanganan dan koordinasi kebencanaan (baik bencana alam maupun bencana sosial)	2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kab. Admn. Kep. Seribu.
3	Pembinaan dan Pemberdayaan	Belum optimalnya pemberdayaan, pengawasan, pembinaan lembaga RT,RW, dan LMK, FKMD; Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya; Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Olahraga,	3. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pranata sosial di Wilayah Kab. Admn. Kep. Seribu.

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel di atas dapat dijelaskan secara singkat masing-masing isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh stakeholder Kab. Admn. Kep. Seribu;
3. Peningkatan kualitas pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan penataan pranata sosial di Wilayah Kab. Admn. Kep. Seribu.

3.3.1 Penataan Kawasan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dalam sisa masa periode pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2022, pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang utama adalah kondisi perekonomian global yang melambat akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat DKI Jakarta, diperlukan perencanaan yang tepat, efektif, dan berkesinambungan. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan peran dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam konsep penataan kawasan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilakukan perubahan sebagai berikut :

A. Gambaran Umum Pulau Tidung

Pulau Tidung merupakan bagian dari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang terdiri dari Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil dimana Pulau Tidung Besar merupakan salah satu pulau permukiman padat dengan luas 50,13 Ha dan merupakan pulau terluas di Kawasan Gugusan Kepulauan Seribu, dimana terdapat total jumlah penduduk 5.719 orang dengan kepadatan 114,08 orang/ha. Seperti pulau-pulau lainnya, Pulau Tidung Besar dikelilingi terumbu karang tepian (fringing reef) dengan kedalaman 1 – 20 meter dan tumbuh tanaman mangrove serta padang lamun. Mempunyai topografi yang landai (0 - 5 persen) dengan ketinggian rata-rata (0 - 2) meter di atas permukaan laut. Kondisi cuaca di Pulau Tidung Besar sama seperti cuaca umumnya di Kepulauan Seribu yang dipengaruhi oleh musim hujan, musim kemarau, musim pancaroba dengan suhu udara rata-rata antara 26,5 – 28,5 °C. Kelembaban nisbi rata-rata antara 75 – 85 persen, dan tekanan udara rata-rata antara 1.009,0 – 1.011,0 Mb (Dishidros, 1998).



Gambar 1. Lokasi dan Peta Pulau Tidung

Kondisi pemukiman di Pulau Tidung Besar sebagian besar terletak ditengah pulau dengan bangunan permanen dari tembok. Sarana dan prasarana yang dimiliki terdiri dari fasilitas umum (Gedung Pemerintahan, Gedung Serba guna, Taman Bermain, Puskesmas Kecamatan), Sarana Transportasi (Dermaga), Gedung Pendidikan, Sarana Beribadatan (Masjid dan Musholla), IPAL, RO, dan Home Stay.

Transportasi untuk dapat mencapai Pulau Tidung Besar dapat melalui Pelabuhan Kali Adem (Muara Angke), Marina Ancol atau melalui Rawasaban dengan menggunakan transportasi umum baik berupa kapal tradisional yang di kelola masyarakat, kapal boat yang di kelola swasta, atau kapal yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pulau Tidung Besar dengan alam yang khas kepulauan yang indah, lokasinya relative

dekat dengan daratan dibanding dengan pulau-pulau yang berada di Kecamatan Seribu Utara. Hal tersebut menjadikan Pulau Tidung sebagai tujuan wisata dengan perairan yang relative jernih dengan icon utamanya yaitu Jembatan Cinta.

Kondisi di Pulau Tidung yang masih menjadi tantangan yaitu masih kurangnya amenitas dimana dan wisata yang masih bertumpu di titik Jembatan Cinta dengan area tidak cukup luas, dengan kondisi :

- Pelabuhan/Dermaga belum memadai
- Belum adanya jalur pedestrian yang memadai yang menghubungkan Dermaga Utara dan Dermaga Selatan, maupun koridor menuju Jembatan Cinta
- Penerangan jalan umum/lampu taman masih minim
- Masih kurangnya taman dan penghijauan
- Pantai eksisting belum tertata
- Belum adanya plaza dan taman interaktif
- Belum adanya outlet/sentra lokal penjualan ikan

B. Deliniasi Kawasan



Gambar 2. Deliniasi Kawasan Pulau Tidung

Delineasi wilayah perencanaan meliputi Kawasan Dermaga Utara, dan Koridor Penghubung Dermaga Selatan - Dermaga Utara.

C. Potensi dan Permasalahan Utama

Potensi Pulau Tidung :

1. Dermaga Utama (selatan) sebagai pelabuhan kedatangan wisata, dan Dermaga Utara sebagai dermaga nelayan.
2. Pulau Tidung sebagai salah satu tujuan utama wisatawan berkunjung ke Kepulauan Seribu
3. Ketersediaan homestay atau penginapan yang telah berkembang serta cukup banyak
4. Berkembangnya usaha wisata berbasis kelautan oleh masyarakat (seperti snorkling, diving, banana boat, dll) serta Usaha produk rumahan
5. Sumber daya alam hasil kelautan yang melimpah
6. Keindahan alam maupun potensi objek wisata
7. Infrastruktur yang sudah terbangun (SWRO, Listrik 24 jam, Jalan Lingkar, dsb)

Permasalahan Pulau Tidung

1. Spot wisata yang tertata belum menyebar yang masih terpusat di kawasan Jembatan Cinta
2. Ruang terbuka hijau area permukiman masih sangat kurang baik RTH Publik maupun Privat (Rumah Penduduk)
3. Kondisi mangrove pada wilayah Pulau Tidung masuk kedalam kategori rusak karena tutupan mangrove berada pada angka 27,6 pohon/ Ha (SNI 8033:2014).
4. Permasalahan sampah lokal dan sampah kiriman
5. Koridor penghubung/jalan relatif kecil, dengan lebar rata-rata hanya 2 meter dan tidak ada jalur pejalan kaki
6. Kesiapan masyarakat dalam mendukung Pulau Tidung sebagai kawasan wisata
7. Pelibatan masyarakat dalam hal partisipasi pembangunan ekonomi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan ekonomi (perdagangan dan jasa, ketenagakerjaan, dll)

D. Tema Penataan Kawasan

Penataan Kawasan Pulau Tidung dilakukan dengan melihat potensi yang ada di daerah tersebut dimana sumber daya laut sangat melimpah dan PulauTidung merupakan salah satu tujuan utama wisatawan berkunjung ke Kepulauan Seribu, selain itu perlu juga melihat kebutuhan utama masyarakat serta manfaat dari penataan kawasan tersebut terhadap masyarakat setempat, untuk itu tema penataan dari 4 (empat) kawasan inti di Pulau Tidung adalah **“Pengembangan Pulau Tidung Sebagai Pulau Destinasi Wisata Berwawasan lingkungan”**.

Konsep penataan kawasan di Pulau Tidung adalah dengan mengembangkan sarana prasarana pendukung pariwisata serta Peningkatan kualitas fasilitas pariwisata seperti revitalisasi dermaga utama/selatan dan dermaga utara serta penataan koridor pariwisata dengan pembangunan taman maju bersama di koridor pariwisata yang dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat ataupun wisatawan saat berkunjung ke pulau Tidung. Penambahan vegetasi berupa tanaman hijau dan pohon serta pengembangan gang hijau juga merupakan salah satu konsep penataan berwawasan lingkungan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian alam di Pulau Tidung.

Secara garis besara Tema Penataan Kawasan Pulau Tidung yaitu:

- Konektivitas antar spot-spot wisata di Pulau Tidung dengan membuat koridor penghubung dan memperluas area wisata yang tertata.
- Pariwisata berbasis masyarakat dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat dan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup
- Peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan penduduk dan pariwisata

E. Skenario Penataan Kawasan

Arahan rencana pengembangan Kawasan Pulau Tidung Besar adalah sebagai berikut:

▪ Disisi Utara

Disisi Utara dilakukan Pengembangan Kawasan Dermaga Nelayan yaitu revitalisasi dermaga yang dilengkapi dengan taman interaktif, pengolahan sampah ramah lingkungan, sarana kios penjualan ikan, gazebo dan IPAL



Gambar 3. Rencana Penataan Dermaga Utara

▪ Koridor Penghubung utara – selatan

Membangun koridor penghubung antara dermaga utara dan selatan yang dilengkapi dengan taman vertikal dan pedestrian.



Gambar 4. Rencana Penataan Koridor Penghubung utara – selatan

F. Stakeholder terkait

Pada perencanaan Pulau Tidung terdapat dua Kawasan pengembangan ini yaitu :

a. Pengembangan Kawasan Dermaga Nelayan – Utara

Pengembangan Kawasan Dermaga Nelayan, disisi utara dengan melakukan Pembangunan Kios Penjualan Ikan, Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS 3R, DED Pembangunan Taman Maju Bersama, Pembangunan Taman Maju Bersama, Penambahan Penerangan Lingkungan Dermaga, Pembangunan Gapura dan Gazebo, serta Penyediaan WiFi dan CCTV.

b. Pengembangan Koridor Penghubung Antar Dermaga

Untuk Koridor Penghubung Antar Dermaga Selatan dan Utara, dilakukan Penandaan menuju Kawasan Dermaga Utama (Selatan) dan Dermaga Nelayan (Utara), Penambahan Penerangan, Pembangunan Gang Hijau, Pembangunan Taman Vertical, Pemeliharaan jalan, Peningkatan Pencahayaan, Penyediaan WiFi, Penyediaan Tempat Sampah, serta memberikan serta Bimbingan Teknis kepada masyarakat dan komunitas pendukung pariwisata oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

G. Creative Financing / Konsep

Untuk Pembiayaan 2 (dua) titik Penataan Kawasan Dermaga Utara dan Koridor Penghubung dapat dilakukan dengan pembiayaan dari sumber APBN, APBD, dan sumber sah lainnya. Untuk sumber sah lainnya bisa melalui swadaya atau partisipasi masyarakat, pemberdayaan atau CSR perusahaan, maupun pemberdayaan partisipasi para wisatawan seperti menawarkan wisatawan membeli bibit mangrove dan menanam mangrove langsung ke lokasi wisata mangrove.

H. Gambaran Rencana yang Paling Menggambarkan Permasalahan dan Potensi

- Rencana Penataan Kawasan Dermaga Nelayan – Utara



Gambar 5. Eksisting Kawasan Dermaga Nelayan – Utara



Gambar 6. Rencana Pengembangan Kawasan Dermaga Nelayan – Utara

A. Gerbang Dermaga Utara



B. Kios Ikan



C. Pembuatan Gazebo



D. Taman Interaktif



E. TPS 3 R



F. TAMAN KOMPOS



▪ Rencana Koridor Penghubung Antar Dermaga

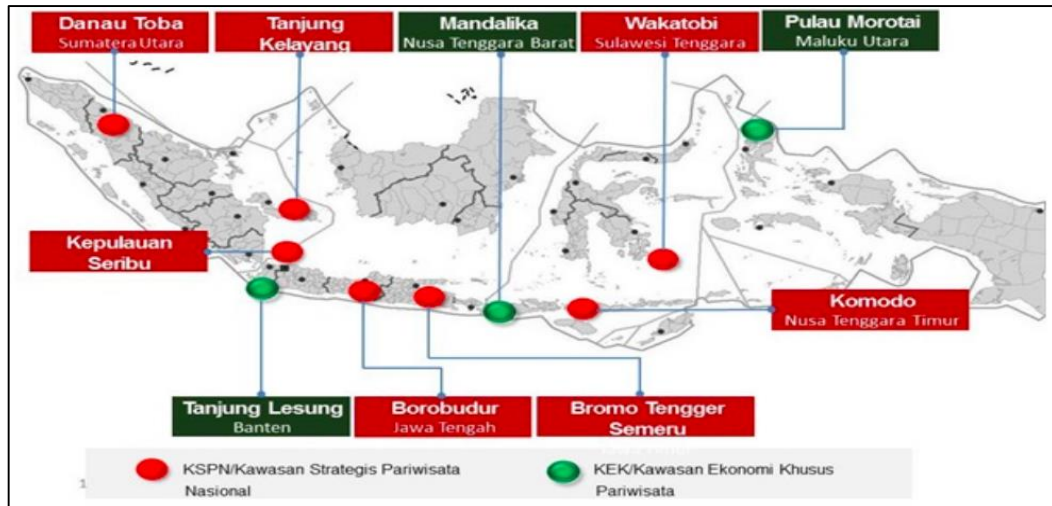


Gambar 7. Eksisting Koridor Penghubung Antar Dermaga



3.4 Telaah Konsep Pengembangan Wisata

Kepulauan Seribu merupakan salah satu dari enam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.6 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Hal yang patut menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di Kepulauan Seribu adalah bahwa pengembangan Kawasan Strategis Wisata Nasional sepenuhnya didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dari sisi perizinan telah adanya pelayanan perizinan investasi yang terpusat satu pintu dengan prosedur perizinan yang mudah. Secara umum kestabilan ekonomi dalam negeri sangat mendukung adanya iklim investasi yang baik. Dengan rata-rata peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat, maka Kepulauan Seribu membutuhkan keterlibatan investor untuk mengembangkan Kepulauan Seribu. Adapun peluang investasi pariwisata unggulan di Kepulauan Seribu sedikitnya terdapat 9 (sembilan) sub sektor pariwisata yakni :

- | | |
|--|---|
|  <i>Eco Wisata</i> |  <i>Wisata Pengobatan</i> |
|  <i>MICE</i> |  <i>Yacht-Wisata Pelayaran</i> |
|  <i>Wisata Heritage dan Sejarah</i> |  <i>Wisata Pantai</i> |
|  <i>Wisata Olahraga</i> |  <i>Wisata Religius</i> |
|  <i>Wisata Pensiun</i> | |

Selain memiliki diversifikasi potensi pengembangan sub sektor pariwisata di atas, masih terdapat keunggulan komparatif yang dimiliki kepulauan seribu, yakni :

1. Lokasi berdekatan dengan bandar udara;
2. Dapat diakses langsung dari kota lain (Banten dan Lampung);
3. Memiliki banyak sumber daya alam dengan lingkungan asri dan pemandangan yang indah;
4. Memiliki potensi gas alam dan minyak;
5. Memiliki bangunan bersejarah, heritage budaya dan keindahan alam.

Lebih lanjut Kepulauan Seribu secara rutin menjadi tempat penyelenggaraan event skala nasional, seperti :



Gambar 3.7 Ragam Penyelenggaraan Event Festival

Saat ini terdapat (5) lima pintu masuk ke Kepulauan Seribu, yakni:

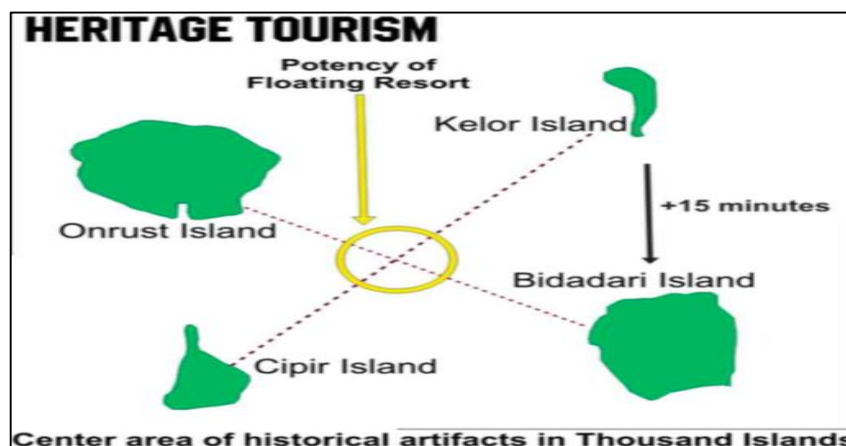
1. Marina Ancol (41 kapal, konsumen menengah keatas);
2. Kaliadem (41 kapal, konsumen menengah kebawah);
3. Sunda Kelapa (2 kapal perintis & kapal cepat, konsumen menengah kebawah);
4. Kalibaru (perahu tradisional, konsumen menengah kebawah);
5. Tanjung Pasir (55 kapal tradisional ukuran kecil, konsumen menengah kebawah).

Peningkatan kunjungan wisatawan seluruhnya melalui transportasi air, pada tahun 2015-2017 meningkat 57% kunjungan wisatawan asing.

Lebih lanjut, penjelasan beberapa aspek penting yang menjadi daya tarik wisata, maupun daya tarik investasi di Kepulauan Seribu antara lain :

1. Wisata Sejarah Heritage

Kisah cerita Pulau Cipir, Pulau Bidadari, Pulau Kelor dan Pulau Onrust adalah cerita yang paling membuat penasaran para wisatawan.



Gambar 3.8 Peta Pariwisata Sejarah dan Heritage

Pulau Cipir juga dikenal dengan sebagai Pulau Kahyangan. Pulau ini memiliki bangunan tua yang bersejarah, dimana didalamnya ada sebuah rumah sakit untuk jemaah haji yang sudah tidak difungsikan. Hal ini sangat menarik, terutama untuk yang memiliki jiwa berpetualang.

Pulau Bidadari memiliki benteng Martello peninggalan Kolonial Belanda, dimana banyak sekali wisatawan yang mengabadikan momen di Kepulauan Seribu dengan menjadikan benteng Martello sebagai ikon yang difoto.

Pulau Kelor memiliki bentuk yang unik seperti daun kelor. Namun meskipun memiliki ukuran yang kecil, Pulau Kelor memiliki sejarah yang dalam sebagai pulau yang digunakan oleh Belanda sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi serangan tentara Portugis. Disana juga memiliki benteng Martello yang menjadi tempat yang menarik wisatawan.

Pulau Onrust memiliki bangunan sejarah/heritage era Belanda dan Jepang, yang pada jaman Belanda merupakan tempat berlabuh kapal, sementara pada jaman Jepang digunakan untuk penjara. Gedung-gedung bersejarah masih berdiri kokoh di Pulau Onrust dan menjadi atraksi menarik bagi wisatawan.

Pulau Bidadari memiliki benteng Martello yang dibangun era kolonial Belanda, dimana banyak wisatawan yang sering mengabadikan momen kedatangannya di benteng Martello.

2. Rencana Pengembangan Pulau Seribu Warna

Dengan mengusung tema Pulau Seribu Warna merupakan sebuah model pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang mengedepankan **wajah bahari berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal**. Nilai kearifan lokal yang **diterjemahkan** dalam bentuk **gerakan** ini pada dasarnya mengambil sisi dari kehidupan secara menyeluruh baik dari **sisi manusia, alam** maupun **infrastruktur** itu sendiri.

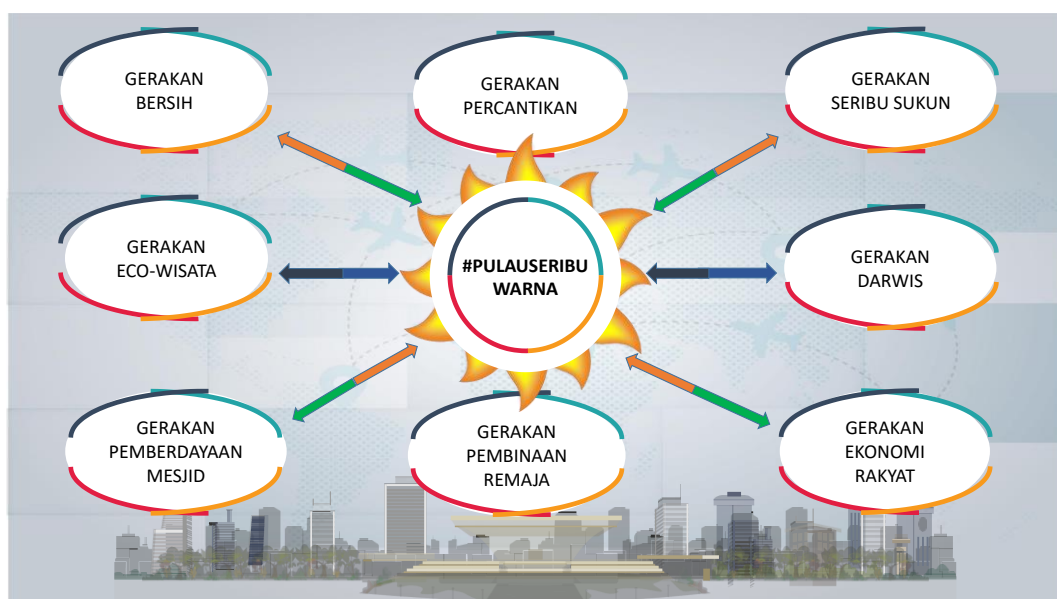
Adapun yang menjadi **tujuan** dari pada gerakan ini pada dasarnya untuk **menjembatani proses pengembangan** pembangunan kawasan wisata Kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi Bali Baru atau yang lebih dikenal dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Perlunya dijembatani dikarenakan kepulauan seribu dari sisi amenities, asesibilitas dan atraksi sebagai indikator dari KSPN memiliki tantangan tersendiri. Dimana diperlukan kerja keras dan koordinasi tidak hanya dengan pemerintah provinsi akan tetapi melibatkan pemerintah pusat. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melihat pentingnya pelibatan komunitas dan masyarakat lokal, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, tidak lain untuk menghindari sebagai penonton dan obyek semata dengan pesatnya perkembangan dunia kepariwisataan sebagai Kawasan Destinasi Bali Baru seperti yang pernah terjadi di Pulau Bali di era tahun 70an. Dapat disimpulkan bahwasanya gerakan yang diambil dari nilai-nilai kearifan lokal ini **menargetkan** sasaran pembangunan manusia pulau seutuhnya

Adapun nilai kearifan lokal yang tertuang didalam Gerakan Pulau Seribu Warna meliputi;

- 2.1. Gerakan Percantikan
- 2.2. Gerakan Bersih
- 2.3. Gerakan Seribu Sukun
- 2.4. Gerakan Ekowisata
- 2.5. Gerakan Darwis
- 2.6. Gerakan Ekonomi Rakyat
- 2.7. Gerakan Pemberdayaan Mesjid
- 2.8. Gerakan Pembinaan Remaja,

Dimana korelasinya dapat digambarkan sebagai berikut :



2.1. Gerakan Percantikan

Adalah gerakan yang **mengubah wajah pulau** untuk menjadikan pulau lebih **aktraktif** dan **manusiawi** dengan memberikan **sentuhan warna** pada icon-icon bangunan ataupun fasilitas umum di setiap pulau penduduk. Efek visualisasi inilah yang kiranya yang akan mampu memberikan **efek psikologis** tidak hanya kepada masyarakat pulau akan tetapi juga kepada para wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu baik dari secara dekat maupun dari kejauhan. Dimana gerakan ini didorong tidak hanya menjadi kebijakan internal akan tetapi didorong juga untuk pihak ketiga dalam berpartisipasi

2.2. Gerakan Bersih

Adalah gerakan kebersihan pulau dari sampah yang tidak hanya **dihasilkan** secara domestik akan tetapi juga dari wisatawan dan arus laut sebagai akibat bermuaranya 13 sungai yang melintas di Jakarta dan sungai dari daerah penyangga seperti Cisadane (Tangerang, Provinsi Banten), Citarum (Banten, Provinsi Jawa Barat) beserta anak sungainya ke Laut Jawa.

Kebersihan pulau adalah salah satu prioritas utama dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kep.Seribu. Hal ini dikarenakan menyadari pentingnya arti sebuah **kebersihan suatu kawasan** sebagai **nilai jual** didalam mempromosikan pariwisata bahari di Kepulauan Seribu. Memang tidak mudah mengurus masalah kebersihan di Kepulauan Seribu dengan segala keterbatasannya sehingga dalam langkahnya, **pelibatan** masyarakat lokal sebagai penyumbang terbesar dari sampah domestik, kebijakan pusat dan propinsi, pihak ketiga baik dari organisasi masyarakat atau dunia usaha menjadi perhatian utama pemerintah kabupaten administrasi kep.seribu dalam mencapai keberhasilan penanganan kebersihan di Kepulauan Seribu

2.3. Gerakan Seribu Sukun

Kegiatan ini tidak lain menegaskan keberadaan tanaman Sukun tidak hanya sebagai sebuah simbol kabupaten akan tetapi juga menjadi cerminan produk unggulan yang berada ditengah masyarakat Kepulauan Seribu. Disamping itu keberadaan Pohon Sukun yang tumbuh secara sporadis berfungsi sebagai penyangga air tanah bagi pulau-pulau di Kepulauan Seribu demikian juga dengan pemanfaatannya yang bersifat lokal atau setempat. Melihat potensi dari eksistensi Pohon Sukun ini, pembudayaan yang **bersifat masif** masih dirasakan perlu dikarenakan tidak hanya untuk **mengakot nilai ekonomis** dan **harkat** dari Pohon Sukun itu sendiri sekaligus **perekonomian rakyat** berbasis pemanfaatan nilai tambah dari Pohon Sukun dan turunannya

2.4. Gerakan Ekowisata

Ekowisata adalah salahsatu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memandang perlu keberadaan ekowisata tidak lain dan bukan untuk **menjaga** keberadaan lingkungan alam dan lingkungan bahari dari kepulaun itu sendiri sekaligus **menumbuhkan** rasa kepemilikan masyarakat pulau akan pentingnya keberlangsungan ekosistem pulau atas dampak menggeliatnya pariwisata di Kepulauan Seribu

2.5. Gerakan Sadar Wisata (Darwis)

Pada dasarnya makna yang terkandung dalam konsep Sadar Wisata adalah **dukungan** dan **partisipasi** seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan **iklim yang kondusif** bagi **tumbuh** dan **berkembangnya** kepariwisataan suatu wilayah. Konsep tersebut telah menempatkan

posisi dan **peran** penting masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan baik sebagai tuan rumah (untuk menciptakan lingkungan dan suasana mendukung diwilayahnya) maupun sebagai wisatawan (untuk menggerakkan aktivitas kepariwisata diseluruh wilayah tanah air, mengenali dan mencintai tanah air khususnya budaya setempat)

Sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan yang menekankan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat serta **orientasi pembangunan** yang mengarah pada 3 (tiga) pilar, yaitu : **Pro Job (menciptakan lapangan kerja)**, **Pro Poor (menanggulangi dan mengurangi kemiskinan)** dan **Pro Growth (mendorong pertumbuhan (pembangunan))**. Makna konsep sadar wisata perlu diperdalam agar meningkatkan posisi masyarakat sebagai **penerima manfaat** yang sebesar-besarnya dari pengembangan kegiatan pariwisata

2.6. Gerakan Ekonomi Rakyat

Pada dasarnya merupakan sebuah gerakan yang mengutamakan pada **sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat**. Dimana yang dimaksud dengan ekonomi rakyat itu sendiri adalah kegiatan usaha atau ekonomi yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasanya terutama meliputi sektor pertanian, perternakan, kerajinan, makanan, dsb, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya

2.7. Gerakan Pemberdayaan Masjid

Optimalisasi peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat adalah yang menjadi tujuan dari gerakan pemberdayaan masjid. Pemerintah Administrasi Kep. Seribu melihat bahwasanya lembaga atau institusi yang menaungi kegiatan dan aktifitas masjid **mampu berperan melebihi** dari

sekedar fungsinya yang sekarang yaitu sebagai tempat beribadah semata akan tetapi menjadi **institusi sosial** yang berperan dalam membangun pendidikan, ekonomi, dan politik umat.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memandang bahwasanya mesjid mampu menjadi agen transformasi umat dengan meperluas fungsinya atau dengan kata lain merekonstruksi kembali sebagai sebuah institusi keagamaan yang modern yang dapat memberdayakan masyarakatnya

2.9. Gerakan Pembinaan Remaja

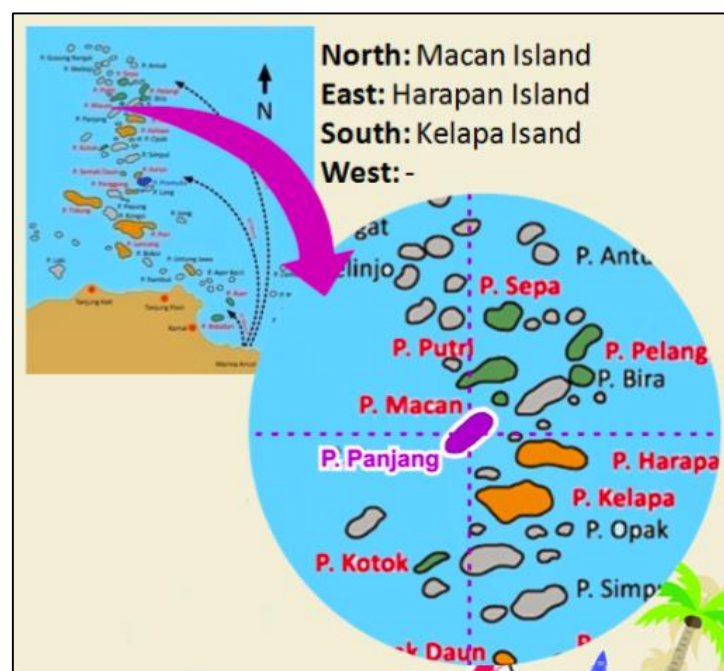
Dalam konteks gerakan pembinaan remaja yang dimaksud adalah usaha yang ditempuh oleh seseorang atau kelompok untuk menjadikan remaja lebih baik dari kondisi yang sekarang dihadapinya. Adanya peningkatan dalam arti cara berfikir, bertindak, bersikap terhadap diri sendiri, orang lain ataupun masyarakat di sekelilingnya

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memandang perlu pembinaan gerakan pembinaan remaja perlu mendapat perhatian serius. Hal ini disebabkan masa remaja adalah masa transisi dan proses pencarian jati diri sebagai manusia . Dikarenakan apabila dimasa ini tidak diperhatikan dan dibina dengan baik dapat menjadi manusia yang salah jalan, menghancurkan dirinya sendiri, dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara spesifik melihat tujuan dari gerakan pembinaan remaja adalah sebagai berikut

1. Menggali potensi diri remaja sebagai aset bangsa
2. Membentuk remaja yang bermoral dan berakhlak mulia
3. Menjadikan manusia cerdas dan terampil
4. Meminimalisir terjadinya kenakalan remaja

Pembangunan Pulau Panjang dibuka untuk skema *Publik Private Partership*. Pulau panjang direncanakan sebagai pusat pasar pariwisata batu dan tempat transit di Kepulauan Seribu. Bandara ini akan memiliki fasilitas tingkat internasional dan terhubung langsung ke Kawasan Wisata Pulau Seribu. Bentuk Pulau Panjang adalah yang paling cocok untuk dibangun bandar udara bandara (hingga 1.400 meter). Letak Pulau Panjang 64 Km dari garis pantai Jakarta, dengan luas area 12,9 Ha. Pulau ini dimiliki oleh pemerintah sejak tahun 1992. Adapun gambar peta lokasi Pulau Panjang dan potensi strategis pengembangan transportasi berdasarkan lokasi serta gambar potensi pengembangan bandar udara dan TOD dapat dilihat pada gambar selanjutnya (Gambar 3.10 hingga Gambar 3.12).



Gambar 3.10 Lokasi Pulau Panjang



Gambar 3.11 Potensi Pulau Panjang Sebagai *Hub* Transportasi



Gambar 3.12 Potensi Pengembangan Bandara dan TOD

4. Renovasi Dermaga Kaliadem dan Pembangunan Transportasi Air

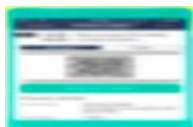
Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kepulauan Seribu diperlukan sistem dermaga yang baik, kapal yang berkualitas dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengoperasikan pelayanan sistem transportasi. Secara singkat Potensi yang ditimbulkan dari pengembangan transportasi adalah :



Fasilitas kapal/pelayaran yang baik akan meningkatkan kepuasan wisatawan dan menstimulus wisatawan untuk kembali datang ke Kepulauan Seribu.



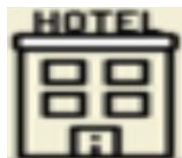
Kapal Tradisional yang unik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu.



Kebutuhan akan adanya sistem transportasi yang mutakhir sangat tinggi dalam mempermudah memberi pelayanan kepada pengunjung (elektronik tiket, *online booking*, dst).



Transportasi laut membuka akses distribusi hasil laut dan komoditas lainnya yang sangat mendukung daya tarik wisata.



Sangat dibuka peluang untuk membuka kapal hotel yang terintegrasi sehingga memudahkan dalam wisatawan mengakses tempat peristirahatan.



Gambar 3.13 Kondisi Eksisting Aktivitas Dermaga Transportasi Air



Gambar 3.14 Kondisi Eksisting Dermaga Transportasi Air

5. Pembangunan Terapung

Dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan jumlah pulau yang tidak bertambah bahkan luas lahan pulau yang semakin berkurang dikarenakan abrasi dan penurunan permukaan tanah pulau menjadikan Kawasan Terbuka Biru sebagai alternatif pembangunan yang menjadi prioritas dan perhatian khusus. Untuk itu Jakarta Kepulauan Seribu mengupayakan dan memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan pembangunan secara terapung di pulau ini yang memanfaatkan laut dangkal.

Pemerintah juga mendorong pengembangan bisnis melalui kerjasama yang ada dengan pendekatan Business to Business (B2B). Adapun ilustrasi gambar resort terapung disampaikan pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15 Contoh Resort Terapung

Sumber : ©M. Rizky Ridwan

6. Agro Wisata Pulau Tidung Kecil

Tidung Kecil adalah pulau yang memanjang di sebelah timur Pulau Tidung Besar. Terhubung ke Tidung Besar melalui jembatan kayu sepanjang 630 meter (2,070 kaki) yang disebut Jembatan Cinta. Pengembangan Tidung Kecil akan ditujukan untuk menjadi pusat agrowisata. Termasuk pariwisata air dan wisata kemping.

Adapun ilustrasi Agro Wisata Pulau Tidung Kecil dapat dilihat pada Gambar 3.16 dan Gambar 3.17.



Gambar 3.16 Pulau Tidung Kecil dan Jembatan Cinta



Gambar 3.17 Pulau-Pulau Favorit di Kepulauan Seribu

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua, serta Terwujudnya Realisasi Anggaran Yang Akuntabel”

Adapun keterkaitan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi pengukuran program dan kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk periode 2017-2022. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
1.	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di kelurahan)	80	83	86	88	88,5
2.	Terwujudnya Realisasi Anggaran Yang Akuntabel	Skor EKPPD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dituntut memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode 2017-2022 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal.

Perlu digarisbawahi bahwa perumusan strategi dan arah kebijakan disusun dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan kata lain strategi dan arah kebijakan yang terumuskan adalah yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai kewenangannya.

Adapun hasil analisis dalam menentukan strategi dan kebijakan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisis Atas Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

Eksternal Internal	Peluang (O) : - Adanya Peraturan Perundangan yang Mendukung Pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Potensi Perekonomian; - Potensi Pariwisata; - Partisipasi Masyarakat.	Tantangan (T): - Bencana Alam; - Kerusakan Lingkungan; - Keterbatasan Air Bersih dan Listrik; - Kondisi Transportasi dan Dermaga; - Kondisi Pengelolaan Sampah dan Kebersihan; - Kondisi Jaringan Komunikasi dan Informasi; - Kondisi Ketahanan Pangan;
Kekuatan (S): - Sebagai bagian wilayah Ibukota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa; - Adanya Komitmen Pimpinan; - Adanya kuantitas sumberdaya manusia yang dapat diberdayakan;	Alternatif Strategi (S-O): - Mengoptimalkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan jajarannya (Kecamatan dan Kelurahan); - Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat; - Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pembentukan wirausaha baru;	Alternatif Strategi (S-T): - Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan monitoring dalam lingkup Administrasi Kepulauan Seribu; - Pembinaan dan penataan kelembagaan kepada RT, RW, LMK, FKMD - Meningkatkan pembinaan, penataan dan pembangunan pranata sosial dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan;
Kelemahan (W): - Keterbatasan Kewenangan Wilayah; - Masih perlu optimalisasi profesionalisme aparatur; - Masih kurangnya infrastruktur baik infrastruktur publik maupun infrastruktur penunjang pelayanan pemerintahan	Alternatif Strategi (W-O): - Meningkatkan dan mengembangkan disiplin serta profesionalisme dengan mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik; - Menumbuhkembangkan fungsi lembaga-lambaga sosial kemasyarakatan yang berdaya dan mandiri	Alternatif Strategi (W-T): - Meningkatkan kualitas sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kabupaten Adm Kepulauan Seribu; - Melakukan intensifikasi koordinasi dalam bidang pelaksanaan kota sehat, penanggulangan kemiskinan, kota layak anak, BOP dan BOS, serta keamanan dan ketertiban kota

5.1.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menetapkan strategi diantaranya :

1. Mengoptimalkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan jajarannya (Kecamatan dan Kelurahan);
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan monitoring dalam lingkup Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat;
4. Mengoptimalkan Kinerja Program Perangkat Daerah dalam Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Mengoptimalkan Kinerja Program Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

1. Melakukan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
2. Melakukan optimalisasi koordinasi bidang penataan kota, kebencanaan, penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan monitoring ketahanan pangan dan stabilitas harga, UKM, pelaksanaan PSN, Penempatan tenaga kerja, posyandu, kartu jakarta pintar plus;
3. Melakukan optimalisasi pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan kepada, UKM, Wirausaha baru, dan peningkatan kesadaran hukum dan ham.

4. Melakukan optimalisasi dalam Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan
5. Melakukan optimalisasi dalam Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua					
MISI 3 RPJMD : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas					
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel					
Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi					
Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel					
Indikator Sasaran : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat; 2. Skor EKPPD					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di kelurahan)	Mengoptimalkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan jajarannya (Kecamatan dan Kelurahan)	Melakukan optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik
				Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan monitoring dalam lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Melakukan optimalisasi koordinasi bidang penataan kota, kebencanaan, penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan monitoring ketahanan pangan dan stabilitas harga, UKM, pelaksanaan PSN, Penempatan tenaga kerja, posyandu, kartu jakarta pintar plus.
				Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat	Melakukan optimalisasi pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan kepada, UKM, Wirausaha baru, dan peningkatan kesadaran hukum dan ham



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Realisasi Anggaran Yang Akuntabel	Skor EKPPD	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Mengoptimalkan Kinerja Program Perangkat Daerah dalam Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Melakukan optimalisasi dalam Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan
				Mengoptimalkan Kinerja Program Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Melakukan optimalisasi dalam Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah dapat disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai perangkat daerah unit pembantu Gubernur. Program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdiri dari :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.03.03 Program Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	15,684,758,886	4	17,805,814,714	4	33,490,573,600	Kabag Umum dan Protokol - Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.03.03.1.02 Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi *****)															-	
A.7.03.03.1.02.03 Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kabupaten Administrasi *****)	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Terpelihara	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	5,009,315,161	4	5,406,626,805	4	10,415,941,966	Kabag Umum dan Protokol - Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.03.03.1.02.02 Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus *****)	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang Kebutuhan BBM nya Terpenuhi	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	6,671,643,418	4	7,892,057,740	4	14,563,701,158	Kabag Umum dan Protokol - Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.03.03.1.02.04 Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas *****)	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	3,972,815,447	4	4,483,372,309	4	8,456,187,756	Kabag Umum dan Protokol - Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.03.03.1.02.01 Penyediaan jasa Perizinan KDO/KDO Khusus *****)	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang Dokumen Perizinannya Lengkap dan Berlaku	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	30,984,860	4	23,757,860	4	54,742,720	Kabag Umum dan Protokol - Sekretaris Kecamatan
A.7.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	34,509,323,706	4	31,990,363,738	4	66,499,687,444	Kabag Umum dan Protokol - Kepala UKT 1
A.7.03.01.1.03 Administrasi Umum															-	
A.7.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	188,258,541	4	188,258,541	4	376,517,082	Kabag Umum dan Protokol

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	44,882,530	4	44,882,530	4	89,765,060	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Pemeliharaan AC Kantor Bupati	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	152,199,905	4	152,199,905	4	304,399,810	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan dan Mess Karyawan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	199,863,211	4	199,863,211	4	399,726,422	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Meubelair Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	199,614,657	4	199,614,657	4	399,229,314	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Kantor Bupati	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	554,087,853	4	554,087,853	4	1,108,175,706	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Kerumahtanggaan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	58,727,658	4	58,727,658	4	117,455,316	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.64 Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Kapal Angkutan Jenazah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	2,914,329,000	0		4	2,914,329,000	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	138,878,669	4	138,878,669	4	277,757,338	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	29,900,662	4	29,900,662	4	59,801,324	Kabag Umum dan Protokol

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	9,882,000	4	9,882,000	4	19,764,000	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.50 Penyediaan Jasa dan Sarana Operasional Kapal	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Sewa Tambat Labuh Kapal Dinas Kabupaten	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	1,939,491,400	4	1,254,191,400	4	3,193,682,800	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	2,233,222,836	4	2,233,222,836	4	4,466,445,672	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kantor Bupati	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	3,495,715,571	4	2,336,406,580	4	5,832,122,151	Kabag Umum dan Protokol - Kepala UKT 1
A.7.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	176,220,000	4	176,220,000	4	352,440,000	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	69,311,517	4	69,311,517	4	138,623,034	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.43 Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Jumlah Laporan Kinerja Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor, Mekanikal Elektrikal dan Perpustakaan Umum	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	4,889,334,840	4	7,121,938,200	4	12,011,273,040	Kabag Umum dan Protokol - Kepala UKT 1
A.7.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Kinerja Penyediaan Jasa Petugas Administrasi Surat Menyurat/Caraka	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	58,769,022	4	58,769,022	4	117,538,044	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	137,280,000	4	137,280,000	4	274,560,000	Kabag Umum dan Protokol



Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	185,333,984	4	185,333,984	4	370,667,968	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.01.1.03.44 Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Pakaian Kerja dan Perlengkapan Kerja PJLP	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	489,830,836	4	671,196,317	4	1,161,027,153	Kabag Umum dan Protokol - Kepala UKT 1
A.7.03.01.1.03.48 Penyediaan Sewa Gedung/Bangunan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	1,030,673,296	4	1,030,673,296	4	2,061,346,592	Kabag Umum dan Protokol - Kepala UKT 1
A.7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	7,201,694,218	4	9,927,386,031	4	17,129,080,249	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03 Administrasi Umum															-	
A.7.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	462,733,537	4	573,186,683	4	1,035,920,220	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Kantor Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	8,000,000	4	12,000,000	4	20,000,000	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Lurah	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	101,581,976	4	127,661,260	4	229,243,236	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.64 Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus Kelurahan yang Terpelihara	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	81,002,240	4	120,000,000	4	201,002,240	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	277,427,161	4	343,031,055	4	620,458,216	Lurah - Sekretaris Kecamatan



Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	46,019,112	4	109,011,356	4	155,030,468	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	33,474,300	4	38,641,400	4	72,115,700	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Pengolahan Air Limbah	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	602,742,313	4	758,242,300	4	1,360,984,613	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Jasa Air Kantor Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	1,216,567,219	4	1,490,964,000	4	2,707,531,219	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	284,741,600	4	340,265,240	4	625,006,840	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	259,704,878	4	417,663,978	4	677,368,856	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.43 Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Jumlah Laporan Kinerja Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kecamatan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	596,451,445	4	613,845,110	4	1,210,296,555	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Kinerja Penyediaan Jasa Petugas Administrasi Surat Menyurat/Caraka	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	117,538,044	4	117,538,044	4	235,076,088	Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	825,839,576	4	1,737,342,318	4	2,563,181,894	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	783,167,429	4	1,040,553,850	4	1,823,721,279	Lurah - Sekretaris Kecamatan

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	294,754,301	4	453,305,602	4	748,059,903	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.44 Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	206,476,512	4	432,255,435	4	638,731,947	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.01.1.03.48 Penyediaan Sewa Gedung/Bangunan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Rumah Dinas Aparatur Kecamatan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	143,753,500	4	176,000,000	4	319,753,500	Lurah - Sekretaris Kecamatan
A.5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	48,750,000	95	48,750,000	95	97,500,000	Kabag Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
A.5.03.02.1.03 Peningkatan Kapastitas ASN															-	
A.5.03.02.1.03.12 Peningkatan Kapasitas KORPRI	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Senam Kesehatan Jasmani Bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	48,750,000	95	48,750,000	95	97,500,000	Kabag Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
A.2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	660,127,553	4	661,445,507	4	1,321,573,060	Kepala UKT 1
A.2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi															-	

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.2.23.02.1.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	178,847,636	4	178,847,636	4	357,695,272	Kepala UKT 1
A.2.23.02.1.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba anak membaca pada pelaksanaan Hari Anak Jakarta Membaca	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	145,211,110	4	146,512,520	4	291,723,630	Kepala UKT 1
A.2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti Baca Jakarta Tingkat Kabupaten	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	186,528,922	4	186,545,466	4	373,074,388	Kepala UKT 1
A.2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi																
A.2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengunjung perpustakaan umum yang terlayani dengan baik	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	149,539,885	4	149,539,885	4	299,079,770	Kepala UKT 1
A.1.06.06 Program Penanganan Bencana	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	150,000,000	4	150,000,000	4	300,000,000	Kepala UKT 1
A.1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi																
A.1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Makanan Siap Saji	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	150,000,000	4	150,000,000	4	300,000,000	Kepala UKT 1

Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	294,136,000	4	294,136,000	4	588,272,000	Kepala UKT 1
A.2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi																
A.2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Laporan Partisipasi pada Pameran Flora dan Fauna	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	294,136,000	4	294,136,000	4	588,272,000	Kepala UKT 2
A.7.03.03 Program Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	823,068,760	4	823,068,760	4	1,646,137,520	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.03.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi *****)																
A.7.03.03.1.03.01 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu *****)	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	279,925,040	4	279,925,040	4	559,850,080	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.03.1.03.02 Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu *****)	Jumlah Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	543,143,720	4	543,143,720	4	1,086,287,440	Kabag Umum dan Protokol
A.7.03.03 Program Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	72,800,000	95	72,800,000	95	145,600,000	Kabag Keuangan

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.03.03.1.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi *****)																
A.7.03.03.1.03.03 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu *****)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	0	0	-	0	-	0	-	85	10,400,000	85	10,400,000	85	20,800,000	Kabag Keuangan
A.7.03.03.1.03.05 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu *****)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	0	0	-	0	-	0	-	85	39,000,000	85	39,000,000	85	78,000,000	Kabag Keuangan
A.7.03.03.1.03.06 Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu *****)	Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Persen	0	0	-	0	-	0	-	85	23,400,000	85	23,400,000	85	46,800,000	Kabag Keuangan
A.2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	1,848,971,121	4	1,891,614,021	4	3,740,585,142	Kepala UKT 2
A.2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi																
A.2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH Taman dan Makam yang terpelihara	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	1,848,971,121	4	1,891,614,021	4	3,740,585,142	Kepala UKT 2
A.7.01.02 Program Pengelolaan Kecamatan *****)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	56,038,974,701	4	78,603,638,779	4	134,642,613,480	Kepala UKT 2 - Camat - Lurah

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.01.02.1.05 Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi *****)																
A.7.01.02.1.05.09 Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) *****)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	713,564,535	4	1,015,815,000	4	1,729,379,535	Lurah
A.7.01.02.1.05.04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Administrasi yang terbangun *****)	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Administrasi yang terbangun *****)	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	2,565,054,783	4	2,565,054,783	4	5,130,109,566	Kepala UKT 2
A.7.01.02.1.05.01 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan *****)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	426,779,614	4	493,849,138	4	920,628,752	Camat
A.7.01.02.1.05.05 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan *****)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	1,178,139,534	4	2,142,154,850	4	3,320,294,384	Lurah
A.7.01.02.1.05.03 Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada wilayah Kabupaten Administrasi *****)	Jumlah Luas Jalan Lingkungan yang Dipelihara di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu *****)	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	19,102,341,963	4	18,621,959,228	4	37,724,301,191	Kepala UKT 2
A.7.01.02.1.05.06 Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan *****)	Jumlah Laporan Bulanan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	15,944,746,713	4	33,629,168,427	4	49,573,915,140	Lurah
A.7.01.02.1.05.10 Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan *****)	Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	3,576,621,577	4	5,523,604,205	4	9,100,225,782	Lurah

Program/Kegiatan/ Sub- Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.01.02.1.05.07 Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) *****)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	1,047,656,839	4	1,238,426,125	4	2,286,082,964	Lurah
A.7.01.02.1.05.02 Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman *****)	Jumlah Laporan Kinerja Penyediaan Jasa Petugas Pertamanan dan Pemakaman	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	2,980,258,642	4	3,847,534,226	4	6,827,792,868	Kepala UKT 2
A.7.01.02.1.05.11 Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan *****)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	176,409,800	4	187,500,000	4	363,909,800	Camat
A.7.01.02.1.05.08 Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan *****)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan	Indeks	0	0	-	0	-	0	-	4	254,873,998	4	303,842,668	4	558,716,666	Lurah
A.7.01.02 Program Pengelolaan Kecamatan *****)	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	Gedung	0	0	-	0	-	0	-	1	4,299,159,191	1	-	1	4,299,159,191	Kabag Pemerintahan dan Kesra
A.7.01.02.1.05 Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi *****)																
A.7.01.02.1.05.25 Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kabupaten Administrasi *****)	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab Sedang Rumah Dinas Camat	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	88,255,765	0	-	1	88,255,765	Kabag Pemerintahan dan Kesra
A.7.01.02.1.05.35 Rehab Sedang Kantor Lurah Kabupaten Administrasi *****)	Jumlah Kantor Lurah yang direhab Sedang	Gedung	0	0	-	0	-	0	-	1	3,114,958,110	0	-	1	3,114,958,110	Kabag Pemerintahan dan Kesra

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.01.02.1.05.42 Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kabupaten Administrasi *****)	Jumlah Rumah Dinas Lurah yang direhab Sedang	Gedung	0	0	-	0	-	0	-	1	1,095,945,316	0	-	1	1,095,945,316	Kabag Pemerintahan dan Kesra
A.7.01.02 Program Pengelolaan Kecamatan *****)	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95		95		95	-	Kepala UKT 2
A.7.01.02.1.05 Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi *****)																
A.7.01.02.1.05.04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Administrasi *****)	Jumlah Lokasi Ruang Terbuka Hijau yang terbangun	Persen	0	0	-	0	-	0	-	90	10,891,745,241	95	10,891,745,241	95	21,783,490,482	Kepala UKT 2
A.7.01.02 Program Pengelolaan Kecamatan *****)	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	661,921,982	95	774,925,000	95	1,436,846,982	Camat - Sekretaris Kecamatan
A.7.01.02.1.04 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten *****)																
A.7.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan *****)	Jumlah Laporan Peningkatan Tugas dan Fungsi Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	436,330,000	95	475,000,000	95	911,330,000	Camat
A.7.01.02.1.04.03 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan *****)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan yang terlaksanan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	54,765,422	95	45,000,000	95	99,765,422	Camat

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.01.02.1.04.02 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan *****)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan yang terlaksana	Persen	0	0	-	0	-	0	-	85	127,320,000	90	203,925,000	90	331,245,000	Camat
A.7.01.02.1.04.05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan *****)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hasil Musrenbang Kecamatan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	85	43,506,560	90	51,000,000	90	94,506,560	Sekretaris Kecamatan
A.7.01.02 Program Pengelolaan Kecamatan *****)	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	6,466,187,691	95	7,945,929,701	95	14,412,117,392	Lurah
A.7.01.02.1.02 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi *****)																
A.7.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan *****)	Jumlah Laporan Peningkatan Tugas dan Fungsi Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kelurahan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	85	757,303,000	90	814,385,000	90	1,571,688,000	Lurah
A.7.01.02.1.02.07 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan *****)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan yang terlaksanan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	85	210,751,990	90	293,220,000	90	503,971,990	Lurah
A.7.01.02.1.02.06 Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan *****)	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	240,171,950	95	333,255,112	95	573,427,062	Lurah
A.7.01.02.1.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan *****)	Jumlah Laporan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan Kelurahan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	512,109,570	95	751,942,922	95	1,264,052,492	Lurah

Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan/ RSK	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Periode	Target Tahun ke-										Target Capaian Akhir Periode		Unit Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A.7.01.02.1.02.04 Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan*****)	Jumlah Laporan Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	4,272,609,125	95	4,905,600,000	95	9,178,209,125	Lurah
A.7.01.02.1.02.05 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan*****)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan yang terlaksana	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	311,265,000	95	583,952,000	95	895,217,000	Lurah
A.7.01.02.1.02.02 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan *****)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hasil Musrenbang Kelurahan	Persen	0	0	-	0	-	0	-	95	161,977,056	95	263,574,667	95	425,551,723	Lurah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks kepuasan pelayanan kantor	0	3	3	4	4	4	4
2	Jumlah Kantor/Rumah Dinas Lurah dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	0	0	3	0	4	4
3	Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar	0	0	0	1	0	1	2
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	0	3	3	3	4	4	4
5	Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	0	0	80	80	85	85	85
6	Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan	0	0	85	90	95	95	95

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Seribu							
7	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	0	0	85	90	95	95	95
8	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	0	0	84	85	86	87	87
9	Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip)	0	0	85	90	95	95	95
10	Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	0	0	80	85	90	95	95
11	Jumlah Kawasan yang Tertata	0	0	1	1	2	2	6
12	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	0	0	3	3	4	4	4
13	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat	0	0	80	85	90	95	95
14	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	80	0	85	90	95	95	95
15	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	70	0	75	80	85	90	90
16	Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS	0	0	80	85	90	95	95
17	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	0	0	80	80	85	85	85
18	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kabupaten Administrasi	90	90	0	0	0	0	90
19	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	0	90	0	0	0	0	0

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017-2022 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

Perubahan Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

1. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
2. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
3. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.

Demikian, akhir kata penyusun mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja.

Jakarta, September 2020

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

JUNAEDI, S.Sos, M.Si
NIP. 196612051987031003